

BUKU PINTAR

SISTEM ADMINISTRASI & INFORMASI DESA



Ranggoini Jahja
Bambang Herry
M. Afandi

Australian Community Development and Civil Society
Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II



Australian
Aid



indiPT
Indonesian Digital Partnership for Transparency

BUKU PINTAR

SISTEM ADMINISTRASI & INFORMASI DESA



**Rangoaini Jahja
Bambang Herry
M. Afandi**

Australian Community Development and Civil Society
Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II



Australian
Aid



Indiapt

Buku Pintar

SISTEM ADMINISTRASI & INFORMASI DESA/KELURAHAN

- Penulis : Ranggoaini Jahja
Bambang Hery Purwanto
Muhammad Afandi
- Kontributor : Lalu Ratmaji Hijrat, Kades Samparu,
Lombok Tengah
Tarsisius Tani, Bengkel APPEK Kupang
- Penyunting : Sutoro Eko Yunanto
- Reviewer : Widya Pudji Setyanto
- Penata Letak : Candra Coret
- Desain Cover : Eno & Erni
- Ilustrasi : Darban

Copyright@Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggantian maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

Jl. Karangnangka No. 175 Dusun Demangan
Desa Maguwoharjo Kec. Depok Sleman Yogyakarta
Telp./fax: 0274 4333665, mbl: 0811 250 3790
Email: fppd@indosat.net.id
Website: <http://www.forumdesa.org>

Cetakan Pertama : Januari 2014

14,5 x 21 cm, xx + 86 Hal

ISBN : 978-602-14643-4-2



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik adalah “*Rentang kendali dalam Pelayanan Publik*”. Hal ini tidak semata-mata berkaitan dengan jarak fisik-psikologis, namun juga terkait dengan kecepatan-ketepatan pelayanan, dukungan sarana, hingga kualitas sumberdaya manusia.

Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K) yang dikembangkan *Combine Resource Institution* (CRI) merupakan sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas dimaksudkan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa. Adanya dokumentasi data tersebut pada akhirnya bisa menjadi pangkalan data (*database*) warga yang bisa

dimanfaatkan untuk membantu peningkatan kinerja pelayanan publik, pemetaan sosial, perencanaan pembangunan desa, hingga mitigasi kebencanaan.

Seri Buku Sistem Administrasi & Informasi Desa/Kelurahan yang disusun FPPD bersama ACCESS diharapkan dapat mendukung dalam mendorong peran pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan yang aspiratif, hingga mitigasi kebencanaan secara lebih transparan, terukur, terencana, serta tepat sasaran.

Jakarta, Januari 2014

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

TARMIZI A. KARIM

KATA PENGANTAR ACCESS

**Kemandirian desa, mendukung demokratisasi desa,
kearifan lokal, partisipasi, keadilan gender,
penanggulangan kemiskinan, dan akuntabilitas
pembangunan desa**

Kemampuan desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Hadirnya serial buku pintar tentang kemandirian desa ini diharapkan dapat menjadi bacaan segar di desa, khususnya bagi para Kepala Desa, Perangkat Desa, Kader Desa termasuk Kader Posyandu, para pengelola atau pengguna keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan

juga masyarakat desa - baik laki-laki maupun perempuan - untuk menata desanya. Buku ini juga menarik untuk dibaca kawan-kawan para pegiat pemberdayaan masyarakat dan desa, fasilitator desa, dan rekan-rekan Lembaga Swadaya Masyarakat peduli desa. Terlebih dengan lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kehadiran buku-buku pintar ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemberdayaan desa.

Serial buku pintar meliputi 1) Kedudukan dan Kewenangan Desa, 2) Pengelolaan Aset Desa, 3) Pengembangan Regulasi Desa, 4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokrasi Desa, 5) Perencanaan dan Penganggaran Desa, 6) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, 7) Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa, 8) Sistem Administrasi dan Informasi Desa, 9) Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan 10) Reposisi Peran Publik Perempuan di Desa. Buku-buku pintar tersebut disusun terutama berdasarkan pengalaman desa dan daerah wilayah kerja Program ACCESS Tahap II.

ACCESS Tahap II merupakan program pengembangan kapasitas warga dan organisasi warga yang didukung oleh dana hibah dari Pemerintah Australia. Program ini berupaya mendukung kerja-kerja pemberdayaan yang menghargai aspek lokalitas dan menempatkan perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok marginal sebagai subyek pembangunan yang memiliki posisi setara dengan pelaku lainnya.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang telah menghimpun serial buku dalam rangka memberi bahan kepada pelaku dan pejuang di desa dan daerah untuk membantu mereka mengelola desa dengan menghargai kearifan lokal serta memanfaatkan peluang yang diberikan melalui UU Desa menuju desa yang demokratis, berkeadilan gender, dan bebas dari kemiskinan berbagai segi. Semoga buku-buku tersebut dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pelaku dan pegiat pembangunan desa di Indonesia.

Paul Boon

Direktur Program ACCESS Tahap II

KATA PENGANTAR

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

Pemerintah dalam setiap programnya selama ini selalu menganggarkan banyak program-program penanggulangan kemiskinan. Ada program PKH (Program Keluarga Harapan), PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan masih banyak lagi. Semua ini dilakukan karena pada kenyataan yang ada di masyarakat masih banyak rakyat miskin yang perlu diberikan penguatan agar terbebas dari belenggu kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36% penduduk Indonesia) dan hanya turun 0,13 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2011 yang

sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). (*Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012*). Data yang dikeluarkan oleh BPS ini adalah data yang selama ini dijadikan acuan untuk program-program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Masalahnya, ketika penyajian data untuk acuan program tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan akan sangat menghambat upaya pemerintah untuk melepaskan kemiskinan rakyat itu sendiri. Misalnya saat ini masih banyak permasalahan tentang data penerima BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang menyebabkan ada gesekan-gesekan di tingkat warga desa. Biasanya yang dipersalahkan dalam kasus ini adalah kepala desa dan perangkatnya. Warga mengira yang menentukan data penerima program ini adalah pemerintah di tingkat desa. Padahal data yang dipergunakan berasal dari data pemerintah pusat, dalam hal ini adalah data BPS.

“Jika sejak awal perangkat desa dilibatkan, maka tidak akan terjadi kekisruhan penyaluran BLSM, karena perangkat desa pasti melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyawarah bersama perangkat di bawahnya untuk akurasi pendataan,” kata Budiman Sudjatmiko Anggota Komisi II DPR RI dalam pernyataan tertulisnya (*Kompas Rabu 10/7/2013*).

Melihat kondisi di atas, munculnya inovasi desa melalui sebuah aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) atau SAID/K (Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan) ini

menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting diterapkan di desa. Dalam sistem ini perangkat desa secara partisipatif dapat melakukan pengelolaan data dengan akurasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Melalui aplikasi ini juga pemerintah desa akan dipermudah dalam melakukan pelayanan publik dan juga memetakan potensi desa yang dimilikinya. Beberapa contoh pengembangan SAID/K yang dilakukan oleh ACCESS di Indonesia timur dan beberapa wilayah lain ini membuktikan bahwa aplikasi ini sudah menjadi kebutuhan untuk menunjang perbaikan database baik data kependudukan maupun data potensi yang dimiliki desa. Dengan sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi ini tentunya pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh warga dan pemerintah supra desa akan dengan mudah, cepat dan akurat dalam proses penyajiannya. Pada akhirnya program apapun yang dilakukan oleh pemerintah akan semakin berkualitas, berdaya guna dan tepat sasaran.

Sutoro Eko Yunanto

Ketua Steering Committee

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PMD	iii
KATA PENGANTAR ACCESS	v
KATA PENGANTAR FPPD	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR ISTILAH	xix
BAB I PENGERTIAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) DAN SISTEM ADMINITRASI DAN INFOMARMASI DESA/KELURAHAN (SAID/K)	1
Latar Belakang Lahirnya SID-SAID/K	1
Apa yang Dimaksud dengan SAID/K ?	4
Informasi Apa Saja yang Ada dalam SAID/K?	5
Mengapa Desa Membutuhkan SAID/K ?.....	5
Apa Tujuan Adanya SAID/K ?	6

	Apa Manfaat SAID/K?.....	6
	Apa Dasar Hukum Adanya SAID/K ?.....	12
BAB II	MEMBANGUN SAID/K DI DESA DAN KELURAHAN	15
	Prasyarat Penerapan SAID/K.....	15
	Membangun SAID/K dengan Prinsip Partisipatif.	17
	Pada Tahap Mana Keterlibatan Warga ?.....	23
	Aspek Keamanan dan Otoritas Pengelola Data	24
	Penguatan SAID/K Lewat Pembangunan Media Komunitas	26
BAB III	PENERAPAN SAID/K ANTAR DESA DAN MANFAATNYA BAGI SUPRA DESA.....	31
	Mengapa Desa dan Supra Desa Berkepentingan terhadap SAID/K?.....	31
	Apa Persoalan Umum dalam Perencanaan Desa?.....	33
	Apa Tujuan Penerapan SAID/K dalam Perencanaan Desa?.....	34
	Apa yang Dapat Diinformasikan dari Desa ke Kabupaten dalam Perencanaan Desa ?....	35
	Informasi Apa yang Dapat Diberikan dari Kabupaten dalam SAID/K ?.....	36

BAB IV	PENGALAMAN PENERAPAN DAN PEMANFAATAN SID-SAID/K DI BEBERAPA DAERAH.....	37
1.	SID di Wilayah Kebencanaan: Studi Kasus Desa Tamanagung dan Ngargomulyo...	37
2.	SAID/K dan Kesejahteraan Warga	53
3.	SID dan Analisis Kemiskinan Partisipatif (Sebuah Kasus di Gunung Kidul, Yogyakarta)	69
BAB V	PENUTUP	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	79
	TENTANG PENULIS	81
	PROFIL FPPD	83

DAFTAR SINGKATAN

ACCESS	: <i>Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme</i>
ADD	: Alokasi Dana Desa
AKP	: Analisis Kemiskinan Partisipatif
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBGR	: Bulan Bakti Gotong Royong
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPS	: Badan Pusat Statistik
Dukcapil	: Kependudukan dan Catatan Sipil
HT	: <i>Handy Talky</i>
KK	: Kartu Keluarga
KPM	: Kader Pemberdayaan Masyarakat
KPPMD	: Kader Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa
LPBT	: Laporan Pengguna Barang Tahunan
LP2DER	: Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat

Musrenbangdes	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
MCK	: Mandi Cuci Kakus
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
OPRB	: Organisasi Pengurangan Resiko Bencana
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PAD	: Peta Apresiasi Desa
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PP	: Peraturan Pemerintah
QGIS	: <i>Quantum Geographical Information System</i>
Raskin	: Beras Miskin
RKP	: Rencana Kerja Pembangunan
RPJM Desa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SID	: Sistem Informasi Desa
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPA	: Taman Pendidikan Al Qur'an
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISTILAH

Elaboratif	: Rinci dan saling terkait
Enumerator	: Orang yang melakukan pencacahan sensus
Komprehensif	: Bersifat mampu menangkap (menerima)
Integral	: Satu keseluruhan
QGIS	: <i>Quantum Geographical Information System</i> adalah salah satu dari sekian banyak software berbasis geospasial yang gratis/terbuka untuk diunduh dan dipergunakan sesuai kebutuhan

BAB I

PENGERTIAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) DAN SISTEM ADMINISTRASI DAN-INFORMASI DESA/KELURAHAN (SAID/K)

Latar Belakang Lahirnya SID-SAID/K

Pada tahun 2009, *COMBINE Resource Institution* (CRI) merancang suatu program yang disebut dengan “Sistem Informasi Desa (SID)” guna memulihkan kembali kehidupan desa. Pada mulanya SID dirancang untuk melengkapi kekurangan “Profil Desa” yang dianggap tidak rinci menampung keunikan dari data sebuah desa. Selain untuk menunjang peningkatan kelengkapan data desa, program ini juga bertujuan untuk mendukung terselenggaranya proses pengambilan data secara bersama dan demokratis (terbuka dan melibatkan masyarakat) sekaligus mendorong terbangunnya kontrol publik yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

melalui pengembangan sistem informasi dan teknologi berbasis masyarakat (komunitas).¹

Dalam kurun waktu 2009-2010, CRI mempraktikkan program SID di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan Desa Ngelegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Di tahap awal ini, sosialisasi ditempuh melalui perangkat desa dan media (radio) komunitas.² Di awal praktik, program ini menghadapi beberapa kendala seperti: masih belum terbukanya warga dalam menyampaikan data, kesulitan menemui warga dan pengetahuan enumerator-fasilitator yang terbatas (Ranggoaini Jahja dkk, 2012). Namun seiring berjalannya waktu, dampak-dampak positif dari program ini mulai dirasakan, terutama oleh perangkat desa. Bagi perangkat desa, SID telah dirasakan membantu kerja-kerja administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pemerintah desa ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat yang merasa dipermudah dalam melakukan pengurusan surat-menyurat maupun yang terkait dengan urusan kependudukan mereka.

Keberhasilan ini selanjutnya dikembangkan di beberapa wilayah desa lain. Hingga pada Oktober tahun 2012, SID telah dipraktikkan di 16 desa wilayah Daerah Istimewa

1 Lihat Ranggoaini Jahja Dkk, *Sistem Informasi Desa*, 2012, Yogyakarta : CRI dan Yayasan Tifa.

2 Sebelum menggagas program SID, CRI telah merintis pembangunan media (radio) komunitas di beberapa wilayah Indonesia.

Yogyakarta, 73 desa di Jawa Tengah, 1 desa di Jawa Barat, 1 desa di Jawa Timur dan 1 desa di Nusa Tenggara Timur.³ Dengan keberhasilan tersebut, SID dianggap telah melahirkan “pengetahuan” untuk mendorong pembaharuan dan kemajuan demokrasi saat ini, khususnya di desa. Bahkan dalam perkembangannya hingga saat ini, SID telah dikembangkan di Indonesia Timur bekerjasama dengan ACCESS Tahap II untuk sama-sama mewujudkan kemandirian dan demokrasi bagi desa. Khusus untuk penerapan di wilayah-wilayah-wilayah Indonesia Bagian Timur (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat) Sistem Informasi Desa (SID) diperkenalkan dengan nama Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K). Dalam buku pintar ini selanjutnya menggunakan SAID/K.

Ada 4 hal yang mendorong lahirnya SAID/K, yaitu:

1. Adanya suatu kebutuhan untuk mengamankan dokumen-dokumen desa secara digital. Tidak lain langkah yang ditempuh adalah dengan memindahkannya dari kertas menjadi format digital yang tersimpan di dalam komputer.
2. Adanya suatu kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data desa lainnya secara cepat dan tepat.

3 Lihat : www.lumbungkomunitas.net

3. Adanya suatu kebutuhan sistem informasi (aplikasi) yang bersifat terbuka (*open source*) dan gratis agar tidak membebani keuangan desa.
4. Adanya kecenderungan hasil pendataan yang dilakukan berbagai pihak (pemerintah) tidak dibagikan kembali ke desa. Berbagai pihak yang melakukan pendataan tersebut juga menggunakan indikator yang berbeda-beda sehingga data dasar tersebut sulit untuk diolah sebagai kebijakan yang terpadu.

Apa yang Dimaksud dengan SAID/K ?

Pengertian SAID/K dalam arti sempit dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data milik desa guna memudahkan proses pencariannya.

Sedangkan dalam arti luas dimaksudkan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa.⁴

SAID/K terlebih dahulu dipasang di komputer perangkat desa, kemudian unsur-unsur warga desa yang dipilih mengisi data kependudukan, dan aset desa. Kumpulan data yang tersimpan dalam komputer tersebut akan dapat

4 Ranggoaini Jahja Dkk, *Sistem Informasi Desa*, 2012, Yogyakarta: CRI dan Yayasan Tifa

dicari dan diolah sewaktu-waktu baik dalam bentuk data individual, keluarga, maupun variasi data yang dibutuhkan.

Informasi Apa Saja yang Ada dalam SAID/K ?

1. Basis data kependudukan desa, meliputi data dasar keluarga (13 informasi dasar keluarga: KK, NIK, kepemilikan lahan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dll).
2. Informasi dokumen-dokumen desa seperti RPJM Desa, Peraturan Desa dan lain sebagainya.
3. Basis data sumber daya desa, memuat data tentang potensi desa.
4. Informasi jumlah keluarga yang dibagi dalam klasifikasi sosial ekonomi (kaya, sedang, miskin, sangat miskin) di tingkat desa/kelurahan.
5. Informasi jumlah keluarga penerima Raskin & Jamkesmas berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan.

Mengapa Desa Membutuhkan SAID/K ?

Desa membutuhkan Sistem Administrasi dan Informasi untuk menyimpan, memproses dan memperbaharui data dan informasi tentang warga dan potensi desa. SAID/K memiliki spesifikasi dan keunggulan yang dapat mendukung pemerintah desa dalam memberikan layanan

administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan warga. Desa yang memiliki SAID/K dapat menjadi lebih baik dalam memahami kondisi dan kebutuhannya, sehingga dapat merencanakan desa dengan merujuk pada ketersediaan sumber daya di dalam maupun di luar desa.

Apa Tujuan Adanya SAID/K ?

1. Menyimpan dan memperbaharui database warga yang aman serta akurat.
2. Memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis pada kebutuhan lokal.
3. Membantu proses penyusunan perencanaan desa.
4. Menjadi alat partisipasi warga desa agar dapat terlibat dalam pembangunan desa.

Apa Manfaat SAID/K?

Manfaat SAID/K secara umum:

1. Perencanaan Pembangunan Desa
Data dasar kependudukan yang dijadikan dasar penentuan perencanaan menjadi sangat penting dilakukan. Misalnya, SAID/K dipergunakan untuk merencanakan suatu program perbaikan gizi balita di suatu desa. Dalam perencanaan ini sangat diperlukan data berapa

banyak jumlah anak usia balita yang ada di desa tersebut. Untuk keperluan ini, penggunaan SAID/K sangat membantu menemukan data dengan cepat dan akurat. Dalam praktiknya di beberapa desa yang belum mengaplikasikan SAID/K, biasanya untuk memperoleh data anak usia balita ini masih sangat kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama. Ini disebabkan proses secara manual untuk memilih dan mengklasifikasi atau mengelompokkan data usia balita memerlukan ketelitian tinggi dan membosankan.

2. Keterbukaan Informasi

Sebagai bentuk praktik demokrasi maka setiap warga diberikan hak untuk mengetahui informasi terkait rencana pembuatan kebijakan dan prosesnya. Dalam konteks ini SAID/K telah memberikan manfaat dan ruang serta akses bagi warga desa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

3. Pendataan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Warga

SAID/K telah dimanfaatkan di beberapa desa untuk kepentingan olah data pemetaan kesejahteraan sosial ekonomi secara partisipatif dengan indikator lokal. Dalam praktiknya menunjukkan bahwa desa yang melakukan pemetaan kemiskinan ini dapat dengan mudah menemukannya di mana dan siapa yang masuk dalam kategori miskin atau tidak miskin. Data ini yang

kemudian menjadi dokumen desa yang dapat digunakan untuk verifikasi data yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak non-pemerintah.

4. Peningkatan Pelayanan Dasar

Tidak tersedianya data yang akurat serta penggunaan sistem manual dalam membangun data di desa biasanya pelayanannya lamban. Di desa-desa yang telah menggunakan SAID/K dalam praktiknya hampir secara keseluruhan terjadi peningkatan kecepatan pelayanan publik dalam bentuk cetak surat-menyurat, dll. Secara singkat SAID/K dapat memangkas pemborosan waktu.

5. Penanggulangan Kebencanaan

Di wilayah rawan bencana, SAID/K dapat dimanfaatkan untuk membangun basis data kependudukan dan sumber daya yang ditujukan sebagai bagian dari pemetaan potensi penanggulangan bencana. Desa rawan bencana dapat bekerjasama dengan desa penyangga (desa aman terdekat dari wilayah bencana) untuk membangun basis data bersama tentang keadaan yang terkait dengan kebencanaan. Untuk keperluan ini dapat memanfaatkan SAID/K, misalnya, untuk membuat basis data inventarisasi jalur evakuasi, titik kumpul, persebaran lokasi penampungan korban bencana beserta daya tampungnya, membuat database

tentang jumlah, identitas dan karakteristik lainnya dari penduduk desa rawan bencana, dan seterusnya. Jika terjadi bencana, hal tersebut sangat membantu dalam menyediakan informasi tentang berbagai keadaan korban bencana sehingga mempermudah dalam koordinasi penanganannya.

Manfaat SAID/K bagi warga:

1. Masyarakat mudah memperoleh informasi dan dokumen desa sesuai dengan yang diperlukan.
2. Masyarakat dapat mengawal secara aktif usulan Musrenbangdes, jika portal desa dimanfaatkan untuk menso-sialisasikan daftar usulan desa dan dokumen-dokumen alokasi anggaran kabupaten.
3. Jika aplikasi media interaktif diintegrasikan ke dalam sistem (radio komunitas, buletin, *SMS gateway*) maka ruang kontrol dan pelibatan warga terhadap penyediaan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa/supra desa dapat berfungsi optimal.

Tampilan SMS Gateway

Kotak Masuk

+ Tulis Pesan Baru Delete Data

No	Aksi	Nama	Nomor Hp	Isi Pesan	Diterima
1	<input type="checkbox"/>		+6285658565577	meneh	11 Maret 2013 14:25:43 WIB
2	<input type="checkbox"/>		+6285658565577	pengaduan masalah	11 Maret 2013 14:25:56 WIB
3	<input type="checkbox"/>		+6287839301771	Cek lagi	11 Maret 2013 15:47:21 WIB
4	<input type="checkbox"/>		+6285658565577	tes dulu ah	11 Maret 2013 15:47:21 WIB
5	<input type="checkbox"/>		+6285658565577	cekkkk	11 Maret 2013 15:47:21 WIB
6	<input type="checkbox"/>		+6285658565577	abc	11 Maret 2013 15:47:21 WIB
7	<input type="checkbox"/>		+6287839301771	Cek lg	11 Maret 2013 15:47:21 WIB
8	<input type="checkbox"/>		+6287839301771	sadf	11 Maret 2013 15:47:21 WIB

Tampilkan 20 Dari 8 Total Data First 1 Last

Manfaat SAID/K bagi desa:

1. Menyimpan dan memperbaiki database penduduk berdasarkan 13 informasi dasar kependudukan secara aman dan akurat.
2. Mempercepat pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan.
3. Menjadi alat untuk mendorong kesadaran bersama warga agar terlibat dalam proses perencanaan sehingga dapat memperbaiki kualitas RPJM Desa serta perencanaan turunannya.
4. Mendukung perencanaan desa dalam pemberdayaan di tingkat lokal, serta sinkronisasi data, program, dan kegiatan yang masuk ke desa.

5. Jika sistem informasi desa berbasis web, maka SAID/K dapat menjadi instrumen keterbukaan informasi publik dan membantu dalam mempromosikan desa.
6. Memudahkan dalam menemukenali potensi yang ada di desa.

Manfaat SAID/K bagi relasi antar desa:

1. Jika SAID/K saling terhubung maka masing-masing desa dapat memetakan potensi desa lain, sehingga dapat mempertemukan apa yang dibutuhkan (*demand*) dengan apa yang dapat disediakan (*supply*) oleh masing-masing desa.
2. Dalam konteks kebencanaan, SAID/K dapat menjadi alat penghubung antar desa. Dalam konteks ini antara desa yang terkena bencana dengan desa penyangga sama-sama dapat saling terhubung dengan basis data yang tersedia di dalam SAID/K sehingga kedua desa dapat saling membantu. Contoh: Kerjasama antara Desa Tamanagung dan Desa Ngargomulyo di Kabupaten Magelang.

Manfaat SAID/K bagi kabupaten:

1. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk memperoleh perencanaan yang lebih akurat sehingga tepat sasaran dalam mengurai angka kemiskinan.

2. SAID/K yang terhubung di antara desa-desa dapat mempermudah program penguatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya lokal. Ketika potensi masing-masing desa terdata dengan baik, maka peluang untuk mempertemukan *supply-demand* dalam aktivitas produksi antar desa dapat dikembangkan.

Apa Dasar Hukum Adanya SAID/K ?

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 6/2014 ini selain menjadi kekuatan baru untuk mengatur tata kelola desa, juga secara spesifik mengatur tentang Sistem Informasi Desa. Hal ini diatur dalam bab IX, bagian ketiga perihal “Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan”. Pasal 86 menyatakan:

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini dirancang untuk menjadi instrumen yang memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan, maka pemanfaatan SAID/K oleh pemerintah di tingkat desa hingga kabupaten juga bertujuan untuk memfasilitasi publik dalam memperoleh informasi. Sebagaimana hak yang dilindungi oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 yang diantaranya bertujuan :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan

- publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Desa berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai standar pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat. UU No. 25/2009 mengatur hak partisipasi masyarakat dalam hal:

- asas pelayanan publik (pasal 4, huruf f);
- hak masyarakat (pasal 18);
- standar pelayanan (pasal 20 ayat 2);
- pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik (pasal 35);
- peran serta masyarakat (Bab VI pasal 39); dan
- penyelesaian pengaduan (pasal 40).

BAB II

MEMBANGUN SAID/K DI DESA DAN KELURAHAN

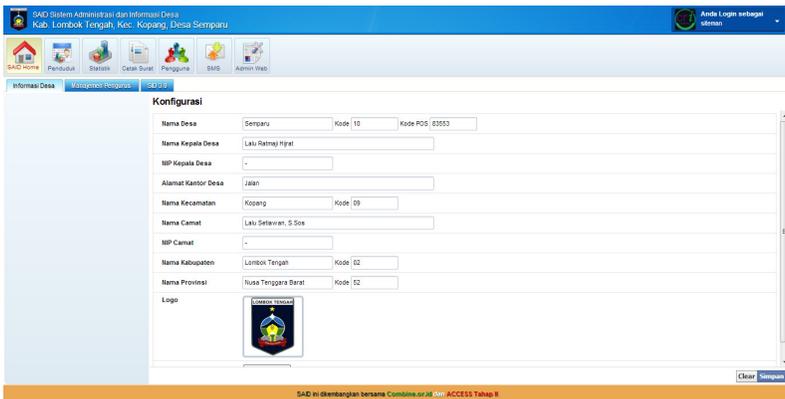
Prasyarat Penerapan SAID/K

Ada 3 komponen prasyarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan SAID/K, yakni:

1. Perangkat teknologi:
 - Listrik
 - Komputer
 - Software (aplikasi)
2. Kapasitas dan Pengetahuan:
 - Perawatan komputer
 - Penguasaan aplikasi
 - Analisis data
3. Organisasi pengelola:
Pengelola SAID/K adalah Pemerintah Desa.

Di bagian terdahulu telah diterangkan bahwa SAID/K pada dasarnya adalah sistem informasi desa. UU No. 6/2014 pasal 86 ayat (5) menegaskan bahwa sistem informasi desa dikelola oleh Pemerintah Desa.

Tampilan SAID/K di Semparu, Lombok Tengah



The screenshot displays the SAID/K web interface for Semparu, Lombok Tengah. The page is titled "Konfigurasi" and contains the following fields:

Nama Desa	Semparu	Kode 10	Kode POS (0000)
Nama Kepala Desa	Lalu Ratmaji Hryst		
MP Kepala Desa			
Alamat Kantor Desa	Jalan		
Nama Kecamatan	Koang	Kode 09	
Nama Camat	Lalu Setiawan, S. Sit		
MP Camat			
Nama Kabupaten	Lombok Tengah	Kode 02	
Nama Provinsi	Nusa Tenggara Barat	Kode 02	
Logo			

At the bottom of the page, there is a footer that reads: "SAID in dikembangkan bersama Combina.or.id dan ACCESS Tahap II".

Membangun SAID/K dengan Prinsip Partisipatif

Dalam mengembangkan SAID/K yang berbasis masyarakat, partisipasi merupakan salah satu unsur penting untuk keberhasilan program ini. Salah satu pengertian partisipasi tersebut dapat merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatan tersebut.⁵ Partisipasi warga dimulai dari perencanaan, perumusan masalah, pengambilan keputusan, pengembangan kapasitas, pemanfaatan sampai pada tahap evaluasi dan monitoring. Tanpa elemen-elemen tersebut keberlanjutan tentang sebuah program akan diragukan.⁶

Adapun tahap-tahap pembangunan SAID/K tersebut adalah :

1. Diskusi Intensif

Tahap ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang pengembangan SAID/K. Masyarakat ditantang untuk menyampaikan aspirasi dan manfaat jika ada sebuah sistem yang terencana. Setelah terbangun pemahaman tersebut, masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama menggali apa yang

5 Determinasi adalah hal yang menentukan. Lihat Wilhem Wau, "Sistem Informasi Desa: Mengelola Sumber Daya Lokal untuk Kemandirian Desa", 2012, Yogyakarta : CRI.

6 Wilhem Wau telah menyusun tahapan-tahapan dalam pembangunan SID. Tahapan tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam tulisan di atas.

menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk program ini serta bagaimana mekanisme keterlibatan dalam proses program ini. Keluaran dari sebuah diskusi intensif adalah berupa peta kerangka kegiatan yang akan menjadi rujukan untuk membangun sebuah sistem.

2. Sosialisasi Program SAID/K

Merupakan proses yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan pembangunan SAID/K. Penyebaran informasi tentang program ini bagi masyarakat luas bermaksud untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, yang mampu mempengaruhi cara berpikir melihat kondisi lingkungan atau desanya.

3. Training (Pelatihan) Kepada Perangkat

Pelatihan ini dilakukan sebagai upaya memperkenalkan perangkat lunak (*software*) yang ada kepada perangkat Pemerintah Desa ataupun warga, untuk mendapat masukan atau penambahan konten (isi) serta pengenalan awal tentang manfaat serta teknik pengaplikasian.



Foto Pelatihan SAID di Kabupaten Bima, 11 Juni 2013 Kerjasama antara COMBINE Resource Institution dan ACCESS Phase II

4. Pendataan/pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka mengisi konten. Data yang dimasukkan bisa berupa data yang memang sudah tersedia di pemerintah desa, namun bisa pula dilakukan pendataan baru agar data yang diperoleh bisa lebih kaya dan valid. Sumber data ini ada tiga, yakni : sumber data kependudukan dari kartu keluarga, sumber data kependudukan dari profil desa dan sumber data yang diinisiasi bersama oleh komu-

nitias. Pada tahap ini juga dilakukan peningkatan keterampilan dalam pengarsipan sebuah data sesuai dengan kategorinya.

5. Input dan Olah Data

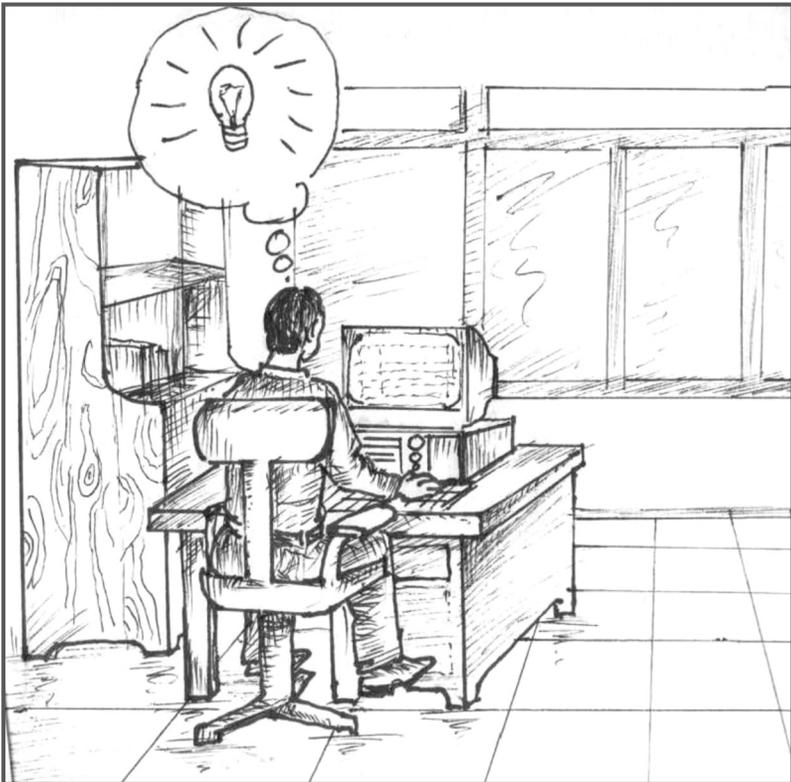
Setelah data terkumpul maka tahap berikutnya adalah memasukkan data ke dalam sistem untuk diolah. Tim entri data mendapat pelatihan yang memadai tentang penggunaan komputer maupun ketelitian memeriksa data yang telah masuk. Seringkali data yang telah di-



isi kurang jelas sehingga perlu diverifikasi kembali ke lapangan. Tim ini bisa terdiri dari perangkat desa ataupun komunitas-komunitas yang ada atau mereka yang memiliki kapasitas mengoperasikan komputer.

6. Pelatihan Aplikasi SAID/K

Pelatihan aplikasi dilakukan setelah seluruh data sudah masuk ke dalam sistem dan sudah siap dioperasi-



kan. Pelatihan ini dilakukan kepada perangkat yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, sebaiknya pelatihan juga melibatkan perangkat desa lainnya, sehingga apabila bagian pelayanan berhalangan hadir, proses pelayanan publik dapat diperankan oleh perangkat yang lain. Keluaran pelatihan aplikasi SAID/K adalah keterampilan untuk pemutakhiran (*updating*) aplikasi.

7. Pelaksanaan Program

Tahap ini merupakan praktik pengoperasian program SAID/K untuk pelayanan publik. Pelayanan publik yang menggunakan sistem ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan yang manual. Keluaran dari tahap pelaksanaan program adalah keterampilan perangkat desa menggunakan aplikasi untuk melayani masyarakat.

8. Evaluasi dan Penyempurnaan

Dalam rangka melengkapi atau memperbaiki sistem yang sudah ada, maka harus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis maupun yang substansial. Misalnya sejauh mana pemanfaatan data oleh masyarakat, metode apa yang lebih tepat dan praktis, organisasi-organisasi sosial apa yang telah dilibatkan, dan lain-lain.

Pada Tahap Mana Keterlibatan Warga ?

Secara umum, keterlibatan warga harus ada dalam 4 hal:

1. Pendataan

Untuk mengkonfirmasi dan memutakhirkan database dapat dilakukan secara langsung pada saat petugas enumerator datang ke rumah warga khusus dalam rangka kegiatan pendataan. Secara tidak langsung, konfirmasi dan pemutakhiran juga dapat dilakukan saat warga datang ke kantor desa untuk kebutuhan memperoleh layanan administrasi. Khusus untuk membangun analisis kemiskinan secara partisipatif, keterlibatan warga desa dari berbagai elemen, mutlak diperlukan.

2. Memasukkan Data

Kegiatan ini juga dapat melibatkan anggota masyarakat, tentunya dengan mandat yang diberikan pemerintah desa sebagai pengelola utama SAID/K.

3. Publikasi Data

Publikasi data dengan menyebarluaskan bagian-bagian tertentu yang merupakan data olahan adalah bagian yang penting untuk mendorong rasa kepemilikan warga terhadap SAID/K. Publikasi yang bersifat reguler juga menjamin proses verifikasi dan kemanfaatan SAID/K.

4. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

SAID/K terdiri dari perangkat komputer dan aplikasi yang dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut oleh desa. Oleh karena itu, warga yang memiliki kemampuan teknis dapat dilibatkan untuk mengembangkan aplikasi maupun memelihara jika terjadi gangguan pada sistem.

Aspek Keamanan dan Otoritas Pengelola Data

Otorisasi (pemberian wewenang) dalam menggunakan SAID/K diberikan secara bertingkat, sehingga tanpa hak akses dari pemerintah desa, menambah, mengubah maupun mencopy data tidak mungkin dilakukan pihak manapun.

Hirarki hak akses tersebut dibagi menjadi 4 yaitu:

1. **Administrator**, yaitu petugas yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk menambah, menghapus atau mengubah data. Oleh karena itu hak dan otoritas aksesnya adalah yang tertinggi. Administrator bertanggung jawab untuk mengelola semua konten (isi) yang ada di aplikasi SAID/K. Bertanggung jawab terhadap kevalidan dan pengelolaan data. Administrator memiliki wewenang untuk mengubah pengguna (*user*) dan juga mengubah kata kunci (*password*).

2. **Operator**, yaitu petugas yang dapat melihat data olahan namun tidak dapat mengubah atau memodifikasi data tersebut. Operator adalah representasi beberapa kelompok warga. Wewenangnya mirip dengan administrator, namun tidak dapat mengubah data pengguna dan juga kata kunci.
3. **Redaksi**, yaitu jurnalis warga yang dapat melihat dan menampilkan data olahan, namun tidak dapat mengubah atau memodifikasi data tersebut. Wewenangnya diberikan sebatas mengelola web desa dan SMS *gateway*.
4. **Pengguna (user) umum**, yaitu warga yang haknya sama seperti Redaksi.

Tampilan Otoritas Pengguna Sistem

Manajemen User

+ Tambah User Baru Delete Data

Semua Search.. Search

No	Aksi	Username	Nama	Group	Last Login
1		admin	Admin	Administrator	14 Maret 2013
2		operator	Operator	Operator	29 Desember 2012
3		tes	AGUSasd	Operator	13 Desember 2012

Tampilkan 20 Dari 3 Total Data First 1 Last

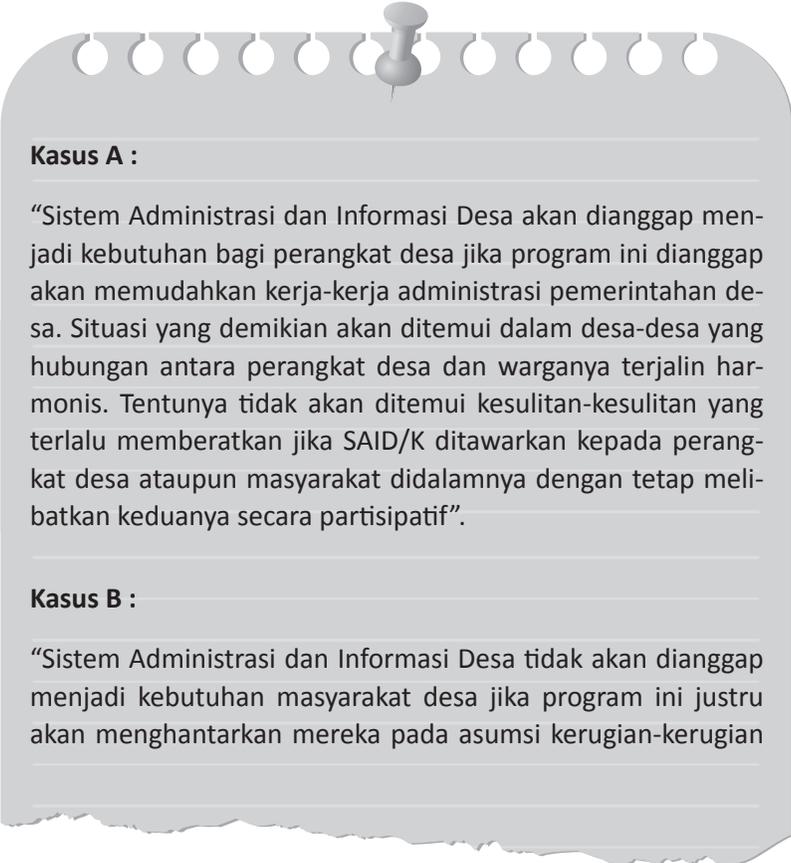
Penguatan SAID/K Lewat Pembangunan Media Komunitas

Beberapa program yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi sosial di masyarakat tidak lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga kenyataan di lapangan akan menunjukkan suatu fakta target yang akan dicapai seringkali tidak terpenuhi. Program yang mulanya diharapkan dapat berkelanjutan pada akhirnya tidak berjalan maksimal dan yang lebih mengkhawatirkan adalah lahirnya sikap ketergantungan. Untuk mengantisipasi kejadian seperti ini biasanya akan lebih efektif jika sebelumnya dilakukan langkah-langkah **mengidentifikasi masalah** dengan prinsip-prinsip *enkulturasi* penuh.⁷

Setelah mendapatkan gambaran umum bagaimana masalah-masalah tersebut, kita akan melangkah pada tahap “**pemetaan struktur sosial**”. Langkah ini ditempuh untuk mendapatkan secara detail bagaimana relasi antar individu ataupun kelompok di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga kompleksitas struktur sosial yang berkembang di dalamnya dapat diuraikan secara sederhana. Untuk itu pertanyaan ini menjadi penting untuk kita refleksikan: Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pe-

7 Strategi ini merupakan refleksi dari penulis selama terlibat dalam pembangunan media berbasis komunitas. Enkulturasi adalah proses alami dalam mempelajari suatu budaya dan sistem sosial masyarakat tertentu secara utuh.

rangkat desa ? Fakta hubungan yang baik di antara kedua pihak ini penting untuk diperiksa. Mengapa? Karena hubungan yang harmonis di antara perangkat desa dan warganya akan mendorong efektivitas dari program ini. Analogi program SAID dihadapkan dengan beberapa kondisi berbeda, sebagai berikut:

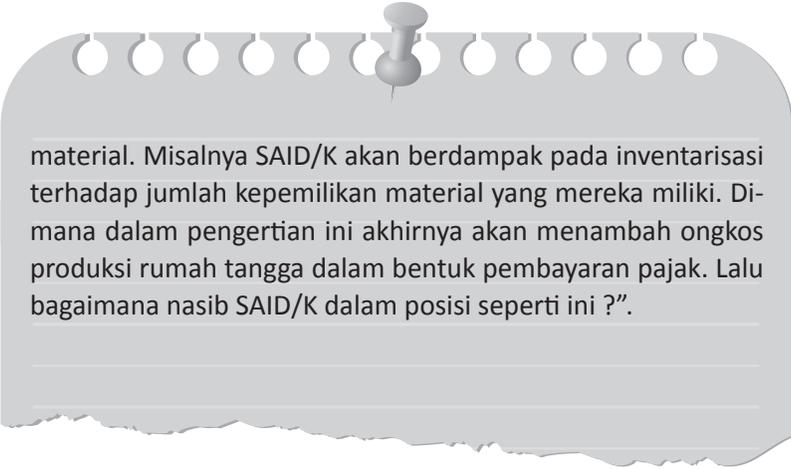


Kasus A :

“Sistem Administrasi dan Informasi Desa akan dianggap menjadi kebutuhan bagi perangkat desa jika program ini dianggap akan memudahkan kerja-kerja administrasi pemerintahan desa. Situasi yang demikian akan ditemui dalam desa-desa yang hubungan antara perangkat desa dan warganya terjalin harmonis. Tentunya tidak akan ditemui kesulitan-kesulitan yang terlalu memberatkan jika SAID/K ditawarkan kepada perangkat desa ataupun masyarakat didalamnya dengan tetap melibatkan keduanya secara partisipatif”.

Kasus B :

“Sistem Administrasi dan Informasi Desa tidak akan dianggap menjadi kebutuhan masyarakat desa jika program ini justru akan menghantarkan mereka pada asumsi kerugian-kerugian



material. Misalnya SAID/K akan berdampak pada inventarisasi terhadap jumlah kepemilikan material yang mereka miliki. Dimana dalam pengertian ini akhirnya akan menambah ongkos produksi rumah tangga dalam bentuk pembayaran pajak. Lalu bagaimana nasib SAID/K dalam posisi seperti ini ?”.

Kedua contoh kasus di atas merupakan gambaran kompleksitas struktur sosial masyarakat desa pada umumnya. Dimana situasi yang demikian akan berpengaruh penting terhadap kelangsungan program-program yang akan ditawarkan, khususnya SAID/K. Satu kesimpulan dasar yang dapat ditarik untuk tercapainya program berkelanjutan adalah meminimalkan sengketa antar pelaku di dalam struktur masyarakat desa itu sendiri. Lalu bagaimana caranya?

Tidak ada salahnya apabila menyebut media komunitas merupakan salah satu komponen untuk merangkai kerja-kerja mediasi. Peran mediasi disini diartikan berfungsi sebagai komunikator untuk menyerap kebutuhan-kebutuhan dari akar rumput sekaligus sebagai ruang organisasi

bagi masyarakat. Ini ditempatkan dalam satu kerangka yang konsisten, sehingga kesadaran yang terbangun akan membentuk suatu kesadaran organisasional. Singkat kata, media komunitas dalam berbagai bentuk seperti radio komunitas, buletin komunitas dll. dapat berperan sebagai motor pembangunan organisasi akar rumput sekaligus berperan sebagai media sosialisasi program SAID/K.

Media Sosialisasi Program SAID/K





BAB III

PENERAPAN SAID/K ANTAR DESA DAN MANFAATNYA BAGI SUPRA DESA

Mengapa Desa dan Supra Desa Berkepentingan terhadap SAID/K?

Pada bagian terdahulu dari buku ini telah diterangkan bahwa SAID/K bermanfaat untuk mendukung penyediaan data desa yang sangat diperlukan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Selain itu, SAID/K juga memberikan manfaat yang sama untuk perencanaan pembangunan kawasan perdesaan. Oleh karena itu, baik desa maupun supra desa berkepentingan untuk memperoleh manfaat dari penerapan SAID/K.

UU No. 6/2014 menegaskan sekaligus mengoreksi pengaturan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur PP No. 72/2005. Berikut ini merupakan sebagian pengaturan perencanaan pembangunan desa berdasarkan UU No. 6/2014. *Pertama*, Pemerintah Desa menyusun perencanaan

an Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota (Pasal 79 ayat 1). *Kedua*, Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa (Pasal 79 ayat 6). *Ketiga*, Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota (Pasal 79 ayat 7). *Keempat*, Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa (Pasal 81 ayat 4).

Selain itu, UU No. 6/2014 juga mengatur tentang pembangunan Kawasan Perdesaan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Pasal 83 ayat 1). Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa (Pasal 83 ayat 4). Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Pasal 83 ayat 5).

Pada dasarnya perencanaan pembangunan desa dan pembangunan daerah perlu dibuat dengan maksud agar kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan dalam mendayagunakan

sumber-sumber pembangunan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Oleh karena itu dalam kaitan hubungan desa dengan supra desa, informasi timbal balik tentang perencanaan pembangunan di setiap level pemerintahan harus berjalan lancar dan berkelanjutan. Inilah pentingnya penerapan SAID/K dalam menyediakan informasi tentang keadaan desa secara akurat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa maupun antar desa (kawasan perdesaan). Dengan demikian, baik desa maupun supra desa sangat berkepentingan untuk memanfaatkan SAID/K yang terpasang di desa.

Apa Persoalan Umum dalam Perencanaan Desa?

1. Partisipasi warga dalam proses perencanaan dan penganggaran yang selama ini dilakukan di berbagai desa masih belum optimal. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ini biasanya hanya didominasi oleh pihak kepala desa dan perangkatnya, Kepala Dusun, BPD, RW, RT dan beberapa kelompok-kelompok warga seperti PKK dan kelompok tani.
2. Keterlibatan warga masyarakat sebagai penerima program-program pembangunan tidak dilibatkan dalam memetakan persoalan dan bagaimana mengatasinya.

3. Proses perencanaan pembangunan menjadi tidak akurat yang pada akhirnya program-program pembangunan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Kondisi yang seperti ini menyebabkan kekecewaan bagi banyak desa karena usulan-usulan program pembangunan di desa tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah kabupaten.
4. Persoalan lain yang sering muncul di desa adalah tentang pendataan. Desa belum sepenuhnya melakukan pengelolaan data dengan baik. Dalam berbagai pelaksanaan pembangunan data yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan desa belum valid. Program beras miskin misalnya, masih banyak kasus ketidaktepatan antara data yang ada dengan penerima manfaat. Warga miskin yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program ini malahan tidak menerima tetapi warga yang tidak miskin malah menerima raskin.

Apa Tujuan Penerapan SAID/K dalam Perencanaan Desa?

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Mendukung hubungan dan keterkaitan antara pelaku pembangunan di tingkat desa sampai kepada pemangku kebijakan di tingkat kabupaten.
3. Membantu mempermudah informasi tentang perencanaan desa bagi pemerintah kabupaten dalam pembuatan kebijakan.
4. Memberikan informasi tentang data desa yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara cepat dan akurat.
5. Menjadi alat kontrol bagi desa dalam proses pengawasan usulan-usulan pembangunan sehingga akan dapat dengan mudah diketahui program-program mana yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana.

Apa yang Dapat Diinformasikan dari Desa ke Kabupaten dalam Perencanaan Desa ?

Dalam perencanaan desa, SAID/K memberikan informasi tentang RPJM Desa dan RKP Desa, usulan-usulan dalam musrenbangdes yang sudah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan data kemiskinan yang diperoleh melalui pemetaan partisipatif oleh warga berdasarkan kebutuhan dan kondisi setempat.

Informasi Apa yang Dapat Diberikan dari Kabupaten dalam SAID/K ?

Pemerintah kabupaten dapat dengan mudah menginformasikan tentang perencanaan pembangunan dalam SAID/K ini sampai kepada pagu indikatif anggaran. Informasi ini akan mempermudah dalam penyusunan perencanaan desa dalam proses sinkronisasi dan sinergi perencanaan. SAID/K juga dapat memberikan data dan informasi tentang data kemiskinan sampai ke tingkat desa karena *update* data bisa dilakukan secara berkala oleh pemerintah desa.

BAB IV

PENGALAMAN PENERAPAN DAN PEMANFAATAN SID-SAID/K DI BEBERAPA DAERAH

“Persaudaraan Desa (Sister Village) yang diperkuat dengan SAID/K diharapkan akan mampu menjadi kekuatan dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang- Joko Sudibyo, Kepala BPBD Kabupaten Magelang”

1. SID di Wilayah Kebencanaan: Studi Kasus Desa Tamanagung dan Ngargomulyo⁸

Letusan Merapi dalam Lintasan Jaman

Siapa yang tidak mengenal Merapi, salah satu gunung teraktif di dunia yang terletak di wilayah administratif pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa

8 Ditulis oleh Muhammad Afandi, Staf LitBang Combine Resource Institution

Tengah. Dalam sejarahnya, letusan Merapi telah terjadi beberapa kali dan tiap kali letusan tidak sedikit korban yang ditimbulkan olehnya.

Menurut hasil catatan Kompas (Ahmad Arif Dkk, 2012), mengatakan bahwa letusan terdahsyat Gunung Merapi dalam sejarah modern terjadi pada 15-20 April 1872. Letusan tersebut berlangsung selama 120 jam tanpa jeda dan memusnahkan seluruh pemukiman yang berada di ketinggian 1.000 mdpl sekitarnya. Dalam catatan Kompas tersebut juga mencatat hasil penelitian Andreastuti pada tahun 1999 bahwa Gunung Merapi juga pernah meletus pada kisaran tahun 765-911 dengan kolom letusan hingga mencapai 10 kilometer yang dikategorikan sebagai sub-plinian di Selo, sisi utara Merapi.

Di awal abad 20, tepatnya pada tahun 1930, Merapi kembali meletus dan mengubur 13 desa serta merusak 23 desa lainnya, sekaligus menewaskan 1.369 penduduk. Pada tahun 1961 peristiwa yang sama juga terjadi, bahkan menghasilkan 119 luncuran awan panas. Di penghujung abad 20, pada tahun 1994, letusan gunung ini kembali merenggut korban sebanyak 64 jiwa.

Memasuki awal Abad 21, kembali terdapat 2 peristiwa letusan besar yang terjadi pada tahun 2006 dan 2010. Pada tahun 2006, letusan Merapi dimulai pada tanggal 15 Mei 2006. Letusan ini berlanjut hingga pada tanggal 8 Juni

dengan semburan awan panas sejauh 5 KM mengarah ke hulu Kali Gendol. Peristiwa ini menghanguskan sebagian kawasan utara di Kaliadem wilayah Kabupaten Sleman (bcbd.magelangkab.go.id). Pada tahun 2010, berawal dari peningkatan status “normal” menjadi “waspada” pada tanggal 20 September oleh BPPTK, berlanjut hingga tahap erupsi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober, 28 Oktober hingga 5 November 2010. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 18 November 2010, jumlah korban yang tewas pada letusan Merapi tahun 2010 mencapai 275 orang.

Merapi merupakan gunung berapi yang aktif, sehingga erupsi (letusan) Gunung Merapi tahun 2010 sangat dimungkinkan akan kembali terulang di masa yang akan datang. Dengan demikian, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana letusan merapi dengan cara yang lebih tepat sehingga angka korban bisa diminimalisir? Pertanyaan inilah yang akan coba dijawab pada bagian selanjutnya dengan mempertimbangkan beberapa data dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber.



Persaudaraan Desa (*Sister Village*) di Wilayah Bencana⁹

Bagian ini adalah suatu usaha penataan ulang terhadap bagaimana masyarakat di sekitar Merapi, khususnya di wilayah yang disebut sebagai zona “berbahaya” dalam menghadapi bahaya bencana Merapi dari kurun waktu 1930-2013. Adapun sumber penulisannya adalah hasil pengolahan wawancara penulis dari beberapa narasumber yang dalam hal ini adalah perangkat Desa Tamanagung, Ngargomulyo dan BPBD.

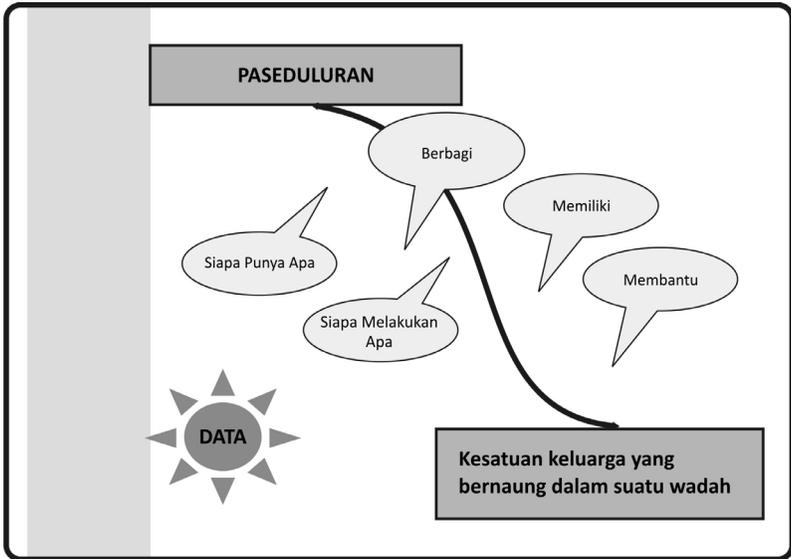
9 Bagian ini merupakan hasil wawancara penulis dengan para narasumber, yaitu Joko Sudibyo (Kepala Pengadaan Logistik BPBD, Kabupaten Magelang), Joko Wiyarno (Kepala Desa Taman Agung) dan Yatin (Kepala Desa Argomulyo) pada tanggal 29 Mei 2013. Wawancara ini dilakukan pada saat acara FGD “Pemetaan Sumber Daya Desa Tamanagung dan Desa Ngargomulyo dalam Rangka Instalasi Sistem Informasi Desa Kebencanaan yang Terintegrasi”, di Aula Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, 29 Mei 2013.

Yatin, Kepala Desa Ngargomulyo menyebutkan bahwa desanya adalah “zona merah”, suatu wilayah yang berdekatan langsung dengan kawasan Gunung Merapi. Masyarakat yang tinggal di Ngargomulyo dari dulu sudah mempunyai cara-cara tersendiri (sistem peringatan) dalam menghadapi bencana letusan Merapi, diantaranya adalah membaca tanda-tanda alam dan petuah (wangsit) dari orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan spiritual tertentu.¹⁰ Baginya orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan spiritual tertentu memiliki pengaruh cukup penting terhadap masyarakat di Ngargomulyo dan sekitarnya dalam menghadapi peristiwa bencana letusan Merapi. Ini dapat dilihat dari rekam jejak yang ia dapatkan dari para sesepuh di desanya. Walaupun tanda-tanda alam sudah mulai tampak namun jika petuah dari “orang sakti” belum lahir maka warga Ngargomulyo pada umumnya belum memilih pindah, tuturnya. Gejala ini menjelaskan bahwa di dalam struktur masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang dianggap mampu menjadi medium perantara kehidupan di lingkungan sekitarnya. Perantara tersebut dianggap sebagai pihak ketiga penerima pesan ataupun pengirim pesan kepada kekuatan-kekuatan yang telah memberi kehidupan.

10 Tanda-tanda alam misalnya adalah turunnya bintang-bintang ke kawasan desa mereka. Hal ini dibaca sebagai pertanda bahwa di kawasan puncak merapi mengalami peningkatan suhu akibat peningkatan aktivitas vulkanis.

Sebelum mengenal istilah relokasi, pada tahun 1930 masyarakat di Ngargomulyo melakukan pengungsian dengan cara menginap di rumah-rumah warga Desa yang lokasinya dianggap aman dari bahaya ancaman letusan Merapi. Keterangan ini juga dibenarkan oleh Joko Sudibyo, Kepala Logistik BPBD Kabupaten Magelang. Menurutnya, pada tahun 1930-an, ukuran rumah di perdesaan Jawa umumnya masih berukuran besar sehingga mampu menampung warga desa Ngargomulyo atau Desa lain yang terkena dampak langsung bencana. Pada tahun 1961, pola pengungsian dari rumah ke rumah juga masih terjadi, namun hal ini tidak lagi berlaku pada letusan tahun 1994. Ia menjelaskan bahwa krisis ekonomi masyarakat perdesaan Jawa pada masa tahun 1990-an telah membawa dampak perubahan pada mengecilnya ukuran rumah-rumah warga, sehingga tidak memungkinkan untuk menampung para warga dengan waktu yang lama.

Konsep Persaudaraan Desa



Dalam wawancara yang dilakukan oleh Joko Sudibyo di beberapa desa yang berstatus aman dari bencana letusan Merapi, didapatkan suatu kesimpulan bahwa mengecilnya rumah-rumah warga di desa yang aman dari bencana tidak memungkinkan untuk menampung warga yang terkena bencana dalam waktu yang lama. Karena selain memberatkan secara ekonomi juga mengganggu ranah privasi si pemilik rumah. Hal ini semakin diperparah saat kejadian letusan Merapi tahun 1961, pemerintah memaksa warga (pengungsi) Ngarjomulyo untuk ikut program “Bedol Desa”. Menghadapi persoalan yang demiki-

an, warga Ngargomulyo lebih memilih untuk menetap di kawasan-kawasan sekitarnya saat bahaya letusan Merapi menyambangi tempat mereka.

Dalam tahun-tahun berikutnya, saat peristiwa letusan tahun 2006, masyarakat lebih bersandar pada keputusan-keputusan “petuah” dari orang-orang yang dianggap mempunyai kekuatan spiritual tertentu dalam menghadapi ancaman bahaya Merapi, dalam hal ini Mbah Maridjan. Ajakan pemerintah untuk mengungsi di tempat yang telah ditetapkan tidak diindahkan oleh warga. Peristiwa selamatnya Mbah Maridjan dari ancaman Merapi tahun 2006, tidak tersedianya tempat pengungsian yang memadai serta trauma akan “Program Bedol Desa” menjadi beberapa faktor penting mengapa masyarakat di Ngargomulyo tetap memilih bertahan di desanya pada saat letusan tahun 2010, khususnya sebelum meninggalnya Mbah Maridjan.

Selanjutnya menurut Joko Sudibyo, terjadi perubahan psikologis dan sosiologis yang cukup besar saat Mbah Maridjan menjadi korban erupsi Merapi dan meninggal pada tanggal 26 Oktober 2010. Meninggalnya Mbah Maridjan berdampak pada psikologis warga. Warga yang pada mulanya tidak ingin mengungsi mendadak ingin diungsikan.

**Tabel 1. Perubahan Pola Pengungsian
Tahun 1930-2010 di Desa Ngargomulyo**

No	Tahun	Pola Pengungsian	Keterangan
1	1930	<i>Door to Door</i> (rumah ke rumah)	Sistem ini didukung oleh sistem kekerabatan dan ukuran rumah warga yang umumnya besar
2	1961	<i>Door to Door</i>	Sistem ini didukung oleh sistem kekerabatan dan ukuran rumah warga yang umumnya besar
3	1994	Warga lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah atau sekitar kawasan.	Pola <i>door to door</i> tidak lagi berlaku karena ukuran rumah-rumah di desa aman (penyanggah) mulai mengecil. Selain itu faktor krisis ekonomi pada tahun 1990-an di pedesaan Jawa juga menjadi faktor lain mengapa pola <i>door to door</i> mulai ditinggalkan.
4	2006	80 persen warga di Ngargomulyo memilih untuk tetap tinggal di desanya,	Selain faktor kuatnya pengaruh kepemimpinan tradisional (Mbah Maridjan) yang dianggap sebagai tokoh kunci Merapi yang menyatakan bahwa tidak akan terjadi bahaya pada letusan tahun 2006, faktor trauma untuk dipindahkan secara permanen (bedol desa) juga menjadi faktor penting mengapa warga tetap memilih untuk tetap tinggal di desa dan menolak untuk diungsikan.
5	2010	<ul style="list-style-type: none"> • 80 persen warga memilih untuk tetap tinggal di desa. • 50 persen mulai memilih mengungsi. • 80 persen sepakat untuk mengungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum Mbah Maridjan meninggal. • Saat Mbah Maridjan meninggal. • Pasca beberapa hari Mbah Maridjan meninggal

Sumber : Wawancara penulis

Namun saat warga mulai memilih untuk mengungsi di tempat-tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah, warga dihadapkan pada situasi yang tragis. Di Kabupaten Magelang hanya terdapat 3 tempat pengungsian, dan hanya 1 tempat yang dinyatakan layak huni. Melihat hal yang demikian, Joko Sudibyo pada tahun 2012 merancang suatu pola penanganan kebencanaan yang lebih manusiawi. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, ia mengatakan :

Kami bermimpi bisa membangun pola pengungsian yang manusiawi. Mimpi ini bermula dari melihat pengalaman pahit yang terjadi dalam kurun waktu 1930-2010, dimana konsep *door to door* yang mulanya sangat menarik dan lebih tepat dalam penanganan bencana Merapi namun tidak mungkin lagi untuk diterapkan karena beberapa hal. Dengan modal cerita dari nenek moyang saya, serta keterangan dari beberapa desa yang saat pengungsian tidak terkonsentrasi di satu tempat, sehingga menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam pendataan dan pencarian maka saya mengga-gas “Desa Bersaudara” sebagai jawaban penanganan bencana yang lebih manusiawi.

“Desa Bersaudara” ini adalah konsep memperbesar skala dari rumah ke rumah menjadi desa ke desa. Dalam praktiknya ada desa penyangga, yaitu desa yang akan difungsikan sebagai desa penampung warga dari desa yang tertimpa bencana. Misalnya Desa

Ngargomulyo akan ditampung di Desa Tamanagung. Dengan demikian sumberdaya yang ada di Desa Ngargomulyo, seperti penduduk, hewan ternak, dll. dapat dipindahkan di Tamanagung dengan terorganisir dan terencana.

Sistem “Desa Bersaudara” ini adalah sebuah konsep yang diharapkan mampu menjawab manajemen buruk dari pengelolaan bencana selama ini. Dengan harapan sistem ini mampu menciptakan “perasaan nyaman di zona aman”. Menurutny, untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 hal yang terpenuhi, yaitu :

1. Rekayasa teknis (*Technical Engineering*)
2. Rekayasa sosial (*Social Engineering*)

Rekayasa teknis dibutuhkan untuk membangun sarana-sarana pendukung seperti tempat penampungan untuk sumber daya ekonomi warga desa terkena bencana di desa penyangga (lokasi penampungan hewan ternak), jalur evakuasi terencana dan prasarana-prasarana lain. Sedangkan rekayasa sosial merupakan alat untuk membangun paradigma baru di tingkat warga dalam menghadapi bencana.

Pada mulanya pemilihan nama *sister village* ini adalah penafsiran Joko Sudibyo terhadap konsep yang ia pahami sebagai desa kembar.¹¹ Walaupun di awal prosesnya, konsep ini diragukan oleh banyak pihak, namun setelah dikembangkan dengan melatih 20 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Magelang, konsep ini menjadi semakin populer.

Membangun SID Kebencanaan

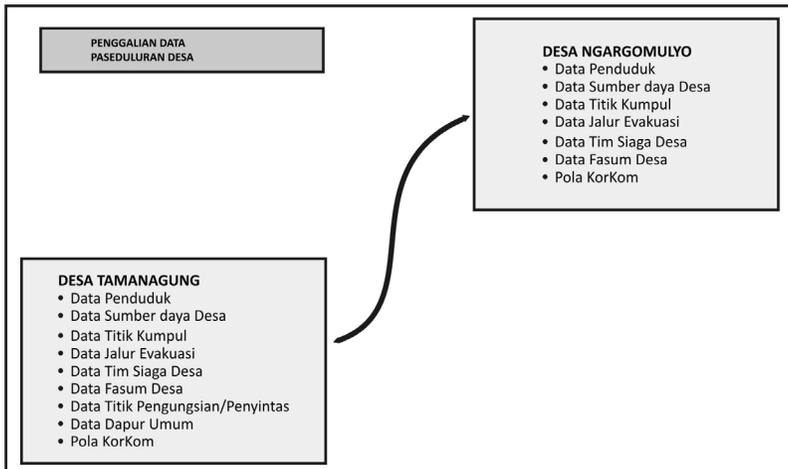
Seperti yang telah dijelaskan bahwa konsep “Paseduluran Desa” ini dalam praktiknya desa Ngargomulyo yang terkena bencana akan direlokasi di Desa Tamanagung. Menurut Sujadi dari BPBD Magelang “Paseduluran Desa” dapat diambil contoh dalam kisah pewayangan di cerita Punakawan, dimana dalam arti harafiahnya adalah rasa setia kawan saling menolong satu sama lain untuk menyelesaikan masalah “Desa Tamanagung menjadi desa yang siap siaga untuk membantu Desa Ngargomulyo”.

Setelah kedua desa bersepakat membangun kemitraan, pada tanggal 12 Mei 2013 dalam acara “Sosialisasi dan Pembentukan Tim *Sister Village* Desa Tamanagung dan Desa Ngargomulyo”, COMBINE memfasilitasi pertemuan bersama tentang sumber daya yang dimiliki ma-

11 Istilah *Sister Village* pertama kali dicetuskan oleh Joko Sudibyo pada saat FGD “penganangan bencana” di Pondok Tingal, tanggal 22 Oktober 2012.

sing-masing desa. Pemetaan tersebut antara lain berupa pemetaan titik kumpul di Desa Ngargomulyo, jalur evakuasi antara Desa Tamanagung dan Ngargomulyo dan titik-titik pengungsian. Pemetaan tersebut ditujukan untuk menggali kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam penguatan sistem paseduluran (persaudaraan) Desa. Menurut Mart Widarto, Manajer Program Bagian Kebencanaan CRI, pemetaan ini merupakan langkah awal penting dalam membangun **Sistem Informasi Paseduluran/Persaudaraan Desa Berbasis Kebencanaan**. Setelah dibangun berdasarkan data yang valid terkait sumber daya masing-masing desa, selanjutnya baru dibahas sektor-sektor apa yang harus dipersiapkan dalam mendukung sistem ini.

Konsep Penggalian Data



Adapun Tahapan Paseduluran Antar Desa adalah :

1. Kaji data integrasi kapasitas
2. Renaksi bersama
3. Uji coba/simulasi

Dalam perkembangannya, kedua desa ini telah mengembangkan SID berbasis kebencanaan. Selanjutnya untuk menguji kemanfaatannya sebuah pelatihan manajemen bencana yang melibatkan perwakilan warga Desa Tamanagung, Ngargomulyo dan organisasi peduli bencana dilakukan. Pelatihan tersebut dilanjutkan dengan simulasi kebencanaan yang melibatkan 150 KK warga Ngargomulyo untuk dievakuasi ke Tamanagung pada tanggal 29 Juni 2013.



Foto Pelatihan SID Kebencanaan di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, 23 April 2013

Sumber : Litbang CRI

Tabel 2. Pemetaan Potensi Desa Tamanagung dan Ngargomulyo

Jenis Potensi	Desa Tamanagung	Jenis Potensi	Desa Ngargomulyo
Organisasi Pengurangan Resiko Bencana	2 Organisasi: LPBT dan OPRB	Organisasi Pengurangan Resiko Bencana	2 Organisasi: OPRB dan SSB Jumlah Personil: 116 Personil
Tempat Pengungsian	Balai Desa/Gedung Serba Guna: ukuran 20x9 m2, dengan 13 MCK, Sumber air bersih	Jumlah Penduduk	803 KK, 2490 Jiwa (1208 Laki-laki, 1282 Perempuan)
	Gedung Muhammadiyah: ukuran 24x16 m2, MCK 2 Kamar, sanitasi air bersih		Dusun Bojong merupakan dusun paling rawan bencana dengan jumlah 179 KK.
	Gedung PKK: ukuran 16x6 m2, digunakan sebagai Pusat Logistik		
	Gedung TPA Bakalan: ukuran 12x6 m2, hanya gedung tanpa sarana air bersih dan MCK		
	TPA Al Huda Sidoharjo: ukuran 8x16 m2, MCK 4 Kamar		
	TPA Bludru: ukuran 4x3 m2, belum ada sarana apa-apa		

Jenis Potensi	Desa Tamanagung	Jenis Potensi	Desa Ngargomulyo
Tempat Pengungsian Ternak	Pasar Hewan (perlu koordinasi dengan dinas terkait), Lapangan Sepakbola Nglawang	Jumlah Ternak	1600 Sapi, 240 Babi
Sarana Kesehatan	Puskesmas Muntilan 2	Tenaga Kesehatan	1 Bidan Desa
Sarana Pendidikan	SD 5, SMP 2, SMU 4, TK 6, Politeknik 1.	Sarana Pendidikan	SD 3, TK 3, Paud 2
Jumlah Kendaraan Evakuasi	Data kendaraan untuk ancaman lahar hujan telah teridentifikasi	Jumlah Kendaraan Evakuasi	25 Kendaraan Roda 4
Potensi Lain	Ada lokasi untuk pendirian tenda darurat	Potensi Lain	Ada tabung bencana sebanyak 20 ekor kambing dan seekor sapi.
	Peralatan Komunikasi berupa HT ada dengan jumlah memadai.		14 Relawan dapur umum beserta peralatannya.
			Peralatan komunikasi berupa HT ada di setiap dusun.

2. SAID/K dan Kesejahteraan Warga

*“Awalnya desa kami sama sekali tidak tahu SAID, ternyata setelah tahu hasilnya bisa begini bagus.”
(Marcelinus, kepala desa di Lombok Tengah)*

Marcelinus merupakan salah seorang kepala desa yang sudah merasakan manfaat SAID/K. Ia berasal dari salah satu desa di Lombok Tengah. Selain desa tempat Marcelinus tinggal, sudah banyak desa lain yang juga mengaplikasikan SAID/K. Penerapan SAID/K di beberapa desa wilayah Indonesia Timur merupakan buah dari kerjasama antara *COMBINE Resource Institution* (CRI) dan *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme* (ACCESS).

Pada mulanya, pertemuan kedua lembaga ini berlangsung dalam sebuah kegiatan lokalatih yang berlangsung di Desa Terong, pada tanggal 13-15 Oktober 2011. Dalam kegiatan ini, ACCESS mengirimkan 11 perwakilan yang terdiri dari staf ACCESS, mitra ACCESS dan perwakilan pemerintah Desa Kairane Kupang, Desa Nanga Tumpu Dompu, Desa Rappoa Bantaeng dan Desa Gunung Silanu Jeneponto.

Jika CRI menamai sistem digital berbasis desa ini dengan Sistem Informasi Desa (SID), ACCESS menamainya

dengan Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K). Penamaan ini didasari akan manfaat pertama (administrasi) yang dirasakan oleh desa/kelurahan yaitu sebagai sistem yang menjadi pusat database warga (*by name by address*) yang akurat dan tersimpan aman sehingga bisa dimanfaatkan untuk layanan administrasi bagi warga. Kemudian manfaat selanjutnya untuk informasi ke supra desa (portal/website desa).

Pada Juni 2013, CRI dan ACCESS Tahap II melakukan kegiatan *Technical Assistance SAID* untuk para fasilitator dan pemerintah desa. Kegiatan ini melibatkan 10 desa yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Lombok Utara, 10 Desa wilayah administratif Kabupaten Bima dan 10 Desa wilayah administratif Kabupaten Dompu.¹²

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, desa memiliki wewenang, salah satunya dalam merencanakan pembangunan. Itu artinya kesempatan dan peluang bagi desa untuk lebih kreatif dalam merancang masa depan warganya menjadi terbuka lebar. Dalam prosesnya, pembangunan selalu menghadapi persoalan yang tidak sepele, salah satunya ialah kemiskinan.

12 Kegiatan *technical assistance SAID/K* bersama CRI dilakukan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan pengembangan SAID/K di Sulawesi Selatan dilakukan oleh LMT (Lembaga Mitra Turatea) Jenepono.

Desa memang bukan satu-satunya komunitas yang memperhatikan persoalan kemiskinan. Negara dengan Badan Pusat Statistik-nya juga sudah melakukan pendataan kemiskinan yang kemudian dikelola oleh TNP2K. Meski demikian, masih diperlukan ukuran dan analisis kemiskinan di tingkat lokal untuk mendukung kelengkapan dan akurasi data, serta tak lupa menjadi bagian dari solusi pengurangan kemiskinan.

SAID/K sebagai sistem informasi elektronik berbasis desa, tentu memiliki peran di tengah persoalan kemiskinan. Karena berbasis desa, akurasi, ketepatan serta aktualitas data sudah tak lagi menjadi pertanyaan. Selain itu, informasi yang terhimpun dan menjadi data desa, baik berupa infrastruktur ataupun sensus, diperoleh dari hasil survey rumah tangga. Itu artinya, komunitas dalam skala terkecil pun tidak hanya tersentuh dalam sistem, namun menjadi bagian tak terpisahkan didalamnya.

Menuju Kesejahteraan Bersama SAID/K

“Penentuan kesejahteraan yang tepat adalah menurut ukuran warga itu sendiri.” (Ryan - Media and Communication ACCESS Tahap II)

Beberapa desa yang sudah beberapa tahun menjalin kemitraan dengan ACCESS sudah banyak menjalankan

program dengan semangat kemandirian. Di era otonomi daerah, spirit inilah yang harus selalu disebarakan ke seluruh warga di desa-desa. SAID/K pun hadir untuk mendukung mewujudkan tersebarnya spirit tersebut.

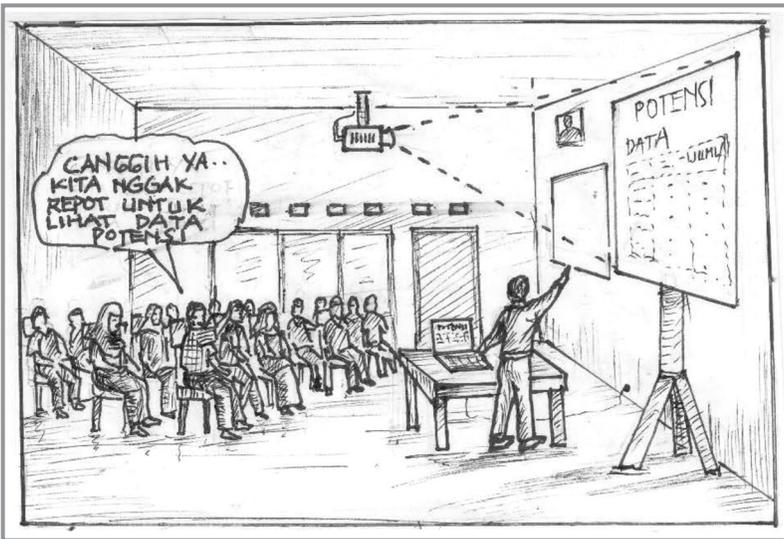
Di salah satu desa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, salah seorang mitra ACCESS menyampaikan keberhasilan penerapan SAID/K dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada bulan Juni 2013.

“Sebelum menggunakan SAID ini, kami juga telah konsen untuk membangun kemandirian desa. Salah satunya adalah dengan melakukan pendataan di desa-desa guna menunjang perbaikan pelayanan di pemerintahan desa. Nah ketika ini di support oleh SAID/K, pendataan dirasakan menjadi lebih baik.”
(Darwis-Mitra ACCESS di Kabupaten Bima, NTB)

Salah satu pendekatan yang digunakan oleh ACCESS Tahap II adalah pendekatan berbasis potensi lokal. Warga dan para perangkat desa diajak untuk mengenali keberhasilan yang pernah mereka capai. Dari pengalaman yang dihasilkan oleh para peserta di beberapa desa, kemudian dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini telah melahirkan kepercayaan bahwa warga mampu melakukan perubahan dari sumber daya yang ada dan secara bertahap menyingkalkan ketergantungan dari pihak luar.



Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SAID
(Lombok Tengah, 27 Agustus 2013)



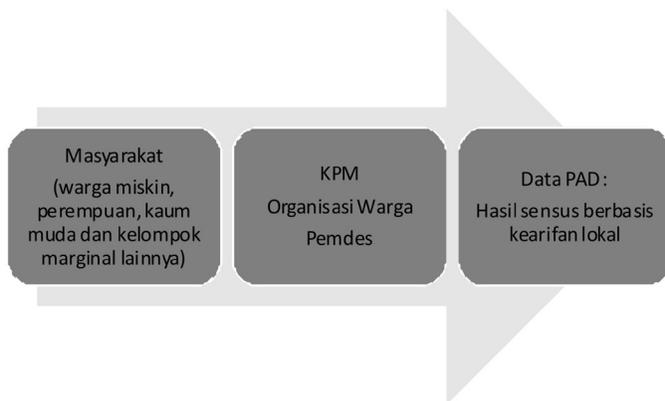
ACCESS menempatkan desa sebagai komunitas yang mampu mendefinisikan sendiri apa itu kesejahteraan maupun yang sebaliknya, bagaimana menjadi sejahtera ataupun sebaliknya, sekaligus mengetahui dan merasakan sendiri faktor-faktor apa saja yang ada di sekitar tema kesejahteraan karena potensi yang mereka miliki.

Cara melihat sejahtera atau tidak akan lebih banyak ditentukan warga. Standar, ukuran dan indikator ditentukan oleh warga dengan difasilitasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). Dengan kata lain, pengertian sejahtera ditentukan bersama dengan warga lain yang juga mendefinisikan kesejahteraan mereka, sehingga bisa dimungkinkan indikator dan ciri pembeda untuk penentu kesejahteraan berbeda antar desa.

Bagaimana Proses Penggalan Database Desa Dikembangkan

1. Memperkuat Kapasitas Fasilitator Desa/KPM, *-KPM siap memfasilitasi*
2. Memperkuat Proses Pengorganisasian Warga, *-Kesadaran, kepemilikan dan kesiapan berproses di tingkat Warga.*
3. Mengembangkan proses-proses apresiatif desa dipimpin masyarakat:
 - Penggalan data asset dan potensi desa secara partisipatif, *-Daftar asset dan potensi desa.*
 - Penentuan indikator kesejahteraan oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa, *-Indikator lokal dan sinergi indikator BPS.*
 - Penggalan data sosial dan kependudukan secara partisipatif (suvey/Sensus Rumah Tangga), *- Data hasil sensus.*
 - Penggambaran peta desa, asset yang ada di desa, lokasi/tata letak rumah berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga, *- Peta Sebaran Rumah Tangga & Asset Desa.*

Siapa Saja Yang Terlibat Dalam Proses Penggalan Database



Proses yang melibatkan warga tersebut kemudian bermuara pada pemetaan sosial ekonomi interaktif. Warga lah yang menentukan sebagian besar data yang dimasukkan ke dalam Peta Apresiatif Desa (PAD). Warga yang menyusun hampir seluruh data termasuk indikatornya, kemudian tervisualisasi dalam peta sosial ekonomi interaktif dan SAID/K.

Proses yang telah diputuskan bersama memiliki banyak keuntungan, baik bagi warga, pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dan kabupaten. Bagi warga, proses yang sebagian besar adalah kerja keras mereka ini tentu akan menumbuhkan rasa memiliki yang lebih tinggi ketimbang proses yang mereka terima sebagai barang jadi. Selain itu, validitas datanya tidak perlu dipertanyakan, karena sumber informasi warga dari warga itu sendiri. Kemudian, ketika warga mengetahui ihwal kesejahteraan beserta faktor-faktor yang ada di sekitar tema tersebut, maka kritisme warga pun muncul dengan sendirinya. Dari seluruh proses yang kemudian menghasilkan pusat data tersebut pada akhirnya membekali warga dengan data beserta visualisasinya yang bisa mereka akses kapan saja. Hal ini tentu bermanfaat bagi warga untuk melakukan pembacaan situasi untuk membuat perubahan. Proses pembacaan pun akan lebih mudah karena data sudah dikelompokkan dengan rapi. Kritisme pun akan tumbuh disini, karena seluruh proses melibatkan warga sekaligus mensyaratkan kerjasama antar warga.

Bagi pemerintah desa, pemetaan sosial ekonomi interaktif tentu bermanfaat ketika pemerintah desa perlu membuat analisis strategi pembangunan dalam RPJMDesa dan RKPDesa. Dari pemetaan interaktif, pemerintah desa memiliki data yang cukup absah karena sifatnya tidak datang dari atas (*top-down*). Ketika data yang diperoleh absah,

proses pengarahan bantuan pun akan berjalan sesuai dengan validitas data yang ada, sehingga tidak ada salah sasaran. Terakhir, memiliki database dan visualisasi yang menarik tentu sudah menjadi harapan bagi kebanyakan warga yang harus banyak bergelut dengan data dan data.

Contoh Gambar Peta Sosial Ekonomi Interaktif yang Menunjukkan Klasifikasi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Tingkat Desa



Bagi kecamatan dan pemerintah kabupaten, pemetaan interaktif tentu memiliki manfaat tersendiri. Secara umum, manfaat yang bisa diambil tak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan pemerintah desa. Hanya saja, bisa kita tarik secara lebih luas. Bagi pemerintah kecamatan dan

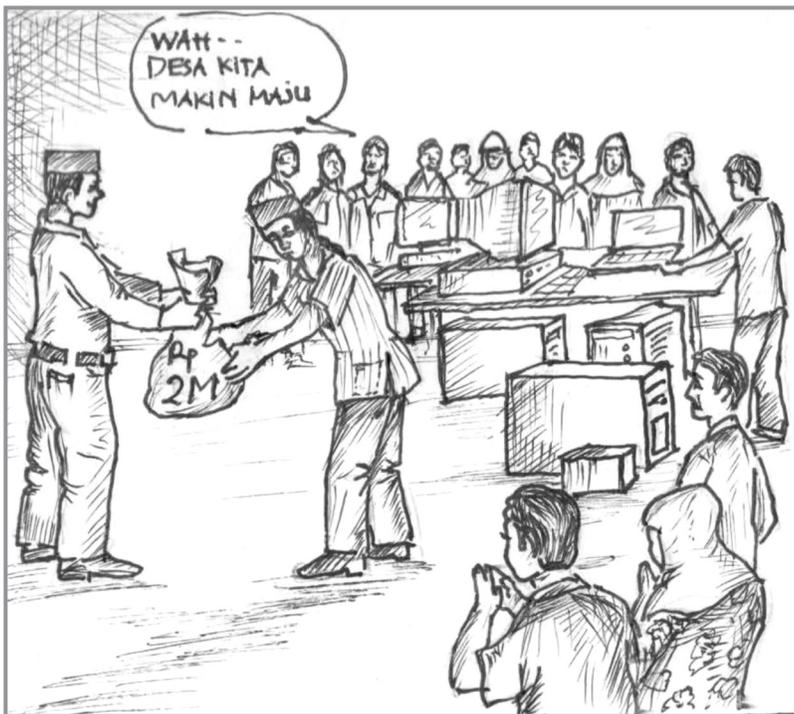
kabupaten manfaatnya ialah pemerintah mempunyai informasi yang valid mengenai kondisi sosial ekonomi warga desa. Hal ini tentu saja akan mempermudah pemerintah kecamatan atau kabupaten melakukan analisis terkait kepentingan menyusun kebijakan yang berpihak pada warga miskin. Terutama, karena definisi sejahtera ditentukan oleh warga sendiri.

Proses penggalian database partisipatif dengan melibatkan warga dan pemerintah desa yang kemudian menghasilkan Analisis Kesejahteraan Partisipatif (AKP) di tingkat desa/kelurahan telah direplikasi oleh beberapa daerah, yaitu: Kabupaten Dompu yang menganggarkan dana 2 milyar rupiah, Lombok Utara 800 juta rupiah, Sumba Tengah 1,8 milyar rupiah. Provinsi NTB juga mengembangkan (wilayah diluar dampingan ACCESS Tahap II) dengan membentuk “*Team E-Social Mapping*” untuk Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, serta Kabupaten Sumbawa Barat.

Di Kabupaten Bima, tepatnya di Kecamatan Donggo, terdapat 9 desa yang mengimplementasikan SAID/K. Dengan program LP2DER yang didukung oleh ACCESS Tahap II, implementasi SAID/K cukup menarik minat dari banyak elemen terutama pemerintah desa. Menurut Darwis, mitra ACCESS dari LP2DER, “dihasilkan beberapa inovasi yang sangat fenomenal, yaitu RPJM Desa, data klasifikasi kese-

jahteran sosial “*by name by address*” dan peta interaktif partisipatif, dimana hal tersebut berbeda dengan yang dihasilkan oleh para pihak lain sebelumnya.”

Menurut Darwis, “Data klasifikasi kesejahteraan sosial “*by name by address*” dan peta sosial ekonomi interaktif mendapat respon positif banyak pihak termasuk pemerintah daerah karena mampu menjawab kebutuhan akan data valid dan memahami situasi sosial ekonomi desa secara mudah dalam menyusun perencanaan pembangunan



daerah. Program dan inovasi LP2DER –ACCESS Tahap II mampu menarik apresiasi dan dinilai strategis oleh para pihak terutama pemerintah daerah.”

Dari semua cerita yang didapat dari penerapan program ini yang paling menarik adalah distribusi dan penyebaran pengaruhnya hingga ke desa-desa sekitar. Beberapa desa yang sudah bermitra dengan ACCESS Tahap II dan menerapkan program SAID/K telah menunjukkan betapa efektifnya pengelolaan informasi, administrasi dan komunikasi desa menggunakan program digital ini, sehingga desa lain diluar dampingan LP2DER – ACCESS Tahap II ini menunjukkan minatnya untuk menerapkan SAID/K. Desa yang berada di luar wilayah dampingan ACCESS tersebut kemudian mereplikasi sistem beserta pendukungnya.

Darwis pun menambahkan bahwa, “Pengakuan pemerintah daerah dan para pihak makin luar biasa ketika data klasifikasi kesejahteraan sosial *“by name by address”* yang telah dihasilkan warga desa secara partisipatif didayagunakan untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan oleh pemerintah desa melalui aplikasi SAID/K. Aplikasi SAID/K yang sangat inovatif dan mudah dioperasikan oleh aparatur desa serta KPPMD ini melengkapi inovasi yang dihasilkan oleh LP2DER – ACCESS Tahap II dalam mendorong peningkatan pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di desa serta perbaikan profil desa. Pene-

rapan SAID/K di Bima dalam kurun waktu singkat (\pm 3 bulan berjalan) telah melipatgandakan pengakuan para pihak pada program yang didorong oleh LP2DER – ACCESS Tahap II. Puncaknya pada tanggal 3 September 2013 dilakukan peluncuran desa rintisan pelayanan administrasi dan informasi berbasis elektronik di Desa O'o Kecamatan Donggo oleh Wakil Bupati Bima sebagai rangkaian acara Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR).”

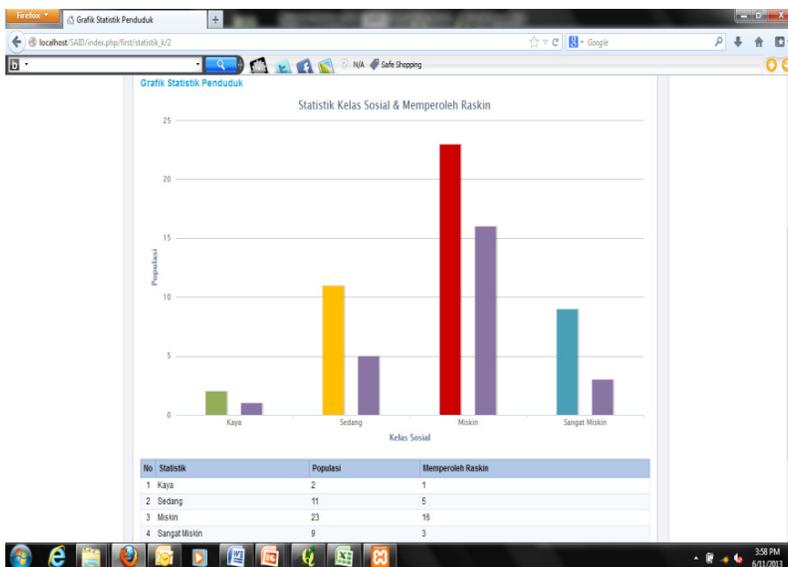
Bahkan desa yang sudah berhasil merasakan manfaatnya, sudah mampu menghasilkan istilah mereka sendiri yang kemudian dijadikan tagline (jargon) dari SAID/K, yakni “pelayanan administrasi kependudukan hanya “setim (serba 3 menit).” Tak hanya digunakan oleh desa tertentu saja, tagline ini kemudian menyebar ke banyak desa. Bahkan, seperti yang disampaikan oleh Darwis, banyak pemerintah desa di luar 9 Desa Donggo yang mendatangi mereka dengan membawa laptop dan meminta pemasangan perangkat lunak SAID/K serta diajari penggunaannya.

SAID ini menggunakan perangkat lunak yang bisa didapat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan setempat, baik warga maupun pemerintah. Ada dua bagian SAID/K, yakni *off-line* dan *on-line*. Bagian *off-line* berisi informasi yang sifatnya pribadi, yang dipergunakan oleh warga untuk keperluan administrasi layanan surat. Sementara bagian *on-line* berisi informasi terbuka yang sifatnya

umum, bisa diakses dan digunakan dalam skala yang lebih luas.

Selain Darwis, Marcelinus, salah satu kepala desa dari wilayah Lombok Tengah juga merasakan manfaat SAID/K. Seperti yang dikutip pada awal paragraf di atas, awalnya ia tidak tahu sama sekali tentang SAID/K, dan setelah mengenal dan bisa menggunakan, ia merasa puas. Pertama, yang ia lakukan bersama warganya adalah dengan pendataan kasar, dari situ ia bisa mendapatkan data yang lengkap. Ratusan kolom diisi dan dijadikan data untuk mengisi SAID/K tersebut. Lama-kelamaan, ia mengutus sekdes dan kaur untuk mengikuti pelatihan. Dengan pelatihan, sistem pun berfungsi secara maksimal. Dari seluruh proses yang dialami bersama warga, Marcelinus merasa bahwa SAID/K banyak membantu. “Jika saya lihat manfaat SAID/K ini adalah satu-satunya program yang bisa membuat kita bisa layani masyarakat dengan tepat dan cepat. Contohnya: kami sudah lakukan pemetaan digital di seluruh desa, rumah pemukiman di desa kami sudah lengkap di situ, lengkap dengan datanya. Dari situ kalau kita butuh Jamkesmas berapa orang, kita tahu, sangat sederhana dan cepat ditemukan. Masalah administrasi, dibandingkan cara kita selama ini bisa makan waktu 15 menit tapi dengan sistem ini 2 menit sudah bisa selesai”, terangnya dalam wawancara yang dilakukan penulis pada 10 September 2013.

Contoh Pemanfaatan SAID/K untuk mengetahui sebaran penerima Raskin yang merupakan program pemerintah pusat berbanding dengan klasifikasi kesejahteraan yang disepakati warga dan pemerintah desa



Dari berbagai pengalaman warga dalam memanfaatkan SAID/K diatas kita bisa lihat peran sistem tersebut bagi segala lapisan masyarakat, baik pemerintah desa, warga maupun pemerintah yang berada diatas desa. Bagi pemerintah desa, tentu SAID/K ini menyediakan data yang mudah diakses. Dengan demikian, pemerintah desa bisa meningkatkan pelayanan administrasi pada warga. Dari situ,

koordinasi dan konsolidasi program pembangunan desa pun akan berjalan dengan baik. Data yang tervisualisasi di SAID/K ini dengan sendirinya akan mendorong masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam membangun desanya. Sementara bagi warga masyarakat, SAID/K mampu menyediakan pelayanan administrasi yang lebih cepat dan akurat. Akses informasi bagi warga secara luas juga terbuka lebih lebar, sehingga warga pun memiliki ruang untuk meningkatkan partisipasinya, salah satunya dengan adanya *SMS gateway*. Bagi pemerintah, SAID/K ini bisa diperbaharui dan akurat, sehingga pembangunan pun bisa ditingkatkan. Informasi terbaru yang ingin disebarluarkan pun bisa disebar dengan adanya SAID/K ini, sehingga sosialisasi sudah tidak lagi menjadi persoalan.

3. SID dan Analisis Kemiskinan Partisipatif (Sebuah Kasus di Gunung Kidul, Yogyakarta)

Jika ACCESS menerapkan program pemberdayaan desa dengan konsep “*welfare*”nya di beberapa desa di wilayah Indonesia bagian timur, di salah satu kabupaten di DIY, Gunung Kidul, diterapkan suatu program bernama Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP).

Masih dalam spirit dan semangat yang sama, yakni kemandirian, persoalan kemiskinan diurai dan dicarikan so-

lusinya bersama. Kabupaten ini telah merumuskan beberapa indikator lokal yang mengindikasikan kemiskinan dalam sebuah analisis yang disebut dengan Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). Meskipun dirumuskan sesuai dengan karakteristik lokal, indikator yang digunakan dalam analisis kemiskinan ini dapat dimanfaatkan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena indikator dalam AKP ini diturunkan dari 14 (empat belas) indikator BPS yang diselaraskan dengan keadaan di Kabupaten Gunungkidul. Latar ini membuat data hasil pendataan yang mengacu pada AKP ini dapat digunakan lintas pihak di Kabupaten Gunungkidul.

Berbagai tahapan sistematis pun dilakukan dalam AKP ini, mulai dari pelatihan hingga penyusunan Pedoman Umum (Pedum). Pelatihan yang dimaksudkan disini melibatkan seluruh pemangku kebijakan terkait dengan data kemiskinan di kabupaten; BPS, Bappeda, Dukcapil, dan tentu saja warga masyarakat yang nantinya akan menjadi sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Dari pelatihan ini akan didapatkan sebuah rumusan indikator-indikator lokal yang nantinya akan dijadikan alat untuk melakukan pemetaan kemiskinan di tingkat desa.

Kemudian, supaya AKP ini berjalan dengan baik, disusunlah Pedoman Umum. Penyusunan Pedoman Umum (Pedum) ini melibatkan tim perumus Pedum baik dari warga masyarakat di tingkat desa sampai tingkat kabupaten.

Pedum ini perlu disusun untuk menjadi arah dan metode pelaksanaan AKP di setiap desa. Hal ini untuk menghindari kebingungan teknis yang kadang muncul di tingkat desa.

Selama ini, AKP yang sudah dilakukan di desa-desa di Kabupaten Gunung Kidul melalui berbagai rangkaian kegiatan yang utamanya melibatkan masyarakat. Kegiatan di mulai dari pembentukan tim pelaksana dan pemantau AKP Desa hingga penetapan hasil data AKP final.

Biasanya, proses *pertama* yang dilakukan ialah pembentukan tim pelaksana dan pemantau AKP Desa. Pembentukan kedua tim ini dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan kepala desa dan semua perangkat desa; kepala dusun, tokoh masyarakat, karang taruna, kelompok perempuan, PKK, kelompok tani dan sebagainya. Jumlah masing-masing tim disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada. Masing-masing dusun diwakili satu orang petugas pelaksana. Pembentukan tim ini, biasanya sedapat mungkin mengakomodasi keterwakilan perempuan.

Kedua ialah pembahasan dan penetapan surat kepala desa. Melalui musyawarah, akan diputuskan serta ditetapkan nama-nama petugas pelaksana dan pemantau AKP. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa untuk Pelaksanaan AKP dengan masa berlaku yang disepakati bersama antara pemerintah dan BPD.

Ketiga, setelah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa untuk Pelaksanaan AKP tersebut, langkah selanjutnya ialah pelatihan pelaksanaan AKP yang diperuntukkan Tim Pelaksana dan Tim Pemantau AKP. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan bagi para pelaksana pendataan dan pemantau AKP. Pelatihan ini juga difasilitasi oleh orang-orang yang pernah mengikuti pelatihan AKP serta paham akan proses pengisian kuesioner dan metode pelaksanaan AKP.

Keempat ialah sosialisasi AKP di tingkat dusun. Sosialisasi ini dilakukan oleh Tim Pelaksana dan Tim Pemantau AKP untuk memberikan penjelasan secara utuh maksud dan tujuan dilaksanakannya AKP bagi warga di tingkat dusun.

Selanjutnya yang utama, yakni pelaksanaan AKP. Pelaksanaan AKP dilakukan dengan mengisi kuesioner yang sudah ada dan dilakukan pada forum-forum yang sudah ada di dusun. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di kelompok-kelompok warga yang paling kecil, misalnya dasa wisma, untuk menjamin akurasi data yang diperoleh. Seluruh proses pendataan ini dilakukan oleh tim pelaksana AKP yang akan berkoordinasi dengan Tim Pemantau AKP.

Setelah AKP dilaksanakan, proses selanjutnya ialah pengisian atau entry data dengan menggunakan Sistem Informasi Desa. Sistem ini yang akan mengolah data isian

AKP yang nantinya secara otomatis akan mengklasifikasi warga sesuai tingkat kemiskinannya. Namun sebelumnya, seluruh desa diharapkan menyediakan perangkat komputer untuk diinstall Sistem Informasi Desa (SID) dan melakukan entry data kependudukan terlebih dahulu untuk memperlancar proses entry dan olah data AKP.

AKP telah dilaksanakan dan dimasukkan kedalam SID. Namun bukan berarti proses itu selesai. Setelah semua dilaksanakan, masih diperlukan uji publik hasil AKP. Uji publik dilakukan sebagai sosialisasi hasil pelaksanaan AKP bagi seluruh warga desa dan dilakukan pada tingkat dusun. Selain itu, forum ini juga dijadikan ruang untuk mengklarifikasi hasil-hasil AKP. Kemudian, jika ada persoalan muncul selama proses, akan diselesaikan dalam forum ini di tingkat dusun.

Ketika sudah melawati uji publik, berarti data sudah siap ditetapkan. Maka tahap paling akhir dari seluruh rangkaian kegiatan ini ialah penetapan hasil data AKP final. Kepala desa mengeluarkan surat keputusan lagi tentang hasil-hasil pendataan AKP, yang kemudian menjadi dokumen desa. Nantinya, hasil pendataan tersebut menjadi dokumen desa yang akan dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan.

Apa yang sejauh ini dihasilkan dari AKP yang dilakukan oleh masyarakat ini? Pertama ialah potret kemiskinan

menurut masyarakat sendiri. Tak hanya itu, akar kemiskinan pun akan bisa teraba melalui AKP. Dengan AKP, masyarakat juga bisa memperoleh peta potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Peta itu kemudian bisa digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Proses pengumpulan data AKP ini biasanya berlangsung selama empat minggu atau sebulan, setiap lima tahun sekali. Sementara verifikasi data AKP idealnya dilakukan setiap tahun, menjelang proses Musrenbang Desa.

BAB V

PENUTUP

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat ini akan sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Pemanfaatan teknologi yang kurang bijak akan berpengaruh negatif pada kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi budaya dari luar dapat menggeser budaya lokal yang akan sangat melemahkan warga dalam upaya-upaya pengelolaan sumber daya alamnya. Salah satu contoh, di beberapa desa pengaruh ini sangat terasa dengan semakin sulitnya mengajak anak-anak muda untuk terjun sebagai petani. Anak muda desa lebih senang merantau ke kota atau bekerja di luar desa, karena menurutnya bekerja sebagai petani tidak bisa menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Memang kondisi yang demikian tidak hanya dipengaruhi faktor teknologi informasi, namun serbuan teknologi informasi yang sedemikian hebat melalui televisi, internet, handphone dan lain

sebagainya pasti akan berpengaruh besar pada budaya dan gaya hidup masyarakat.

Melihat kondisi seperti itu pemanfaatan teknologi yang tepat tentunya akan memperkuat desa dalam proses pengelolaan potensi yang dimilikinya. Lahirnya media teknologi informasi yang diberi nama SID (Sistem Informasi Desa) atau SAID/K (Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan) menjadi angin segar bagi desa untuk dapat mendukung dalam proses-proses pembangunan di desa. Desa akan dimudahkan dalam menata data kependudukan, data kemiskinan, data kerentanan, data potensi desa dan masih banyak lagi. Pengelolaan dengan media teknologi informasi ini juga membantu desa dalam penyebaran informasi bagi pihak-pihak di luar desa maupun warga desa melalui media internet maupun telepon seluler (misal: sms). Pelayanan publik bagi warga pun semakin baik dan efisien karena dapat dikerjakan dengan cara yang cepat dan akurat. Beberapa contoh pengalaman penerapan aplikasi dalam buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi desa-desa lain dalam mengelola teknologi supaya lebih bermanfaat bagi desa.

Gambaran pemanfaatan aplikasi SID atau SAID/K dalam buku ini memang belum terlalu rinci memuat tata cara proses instalasi teknis aplikasi ini. Pembaca dipersilahkan mengunjungi website : <http://lumbungkomunitas.net> untuk

memperkaya pengetahuan terkait SID atau SAID/K sekaligus berinteraksi dengan pengelola aplikasi ini. Semoga bermanfaat bagi kemajuan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Sarjiyo, Triwahyuni Suci Wulandari, Bambang Hery Purwanto, Hernindya Wishnuadji, Menemukanali Akar Kemiskinan, Pedoman Umum Analisis Kemiskinan Partisipatif, Idea, Yogyakarta 2013.
- Norton, Andy, 2001, A Rough Guide to PPAs : *Participatory Poverty Assessment, An Introduction to Theory and Practice*, [online], (info.worldbank.org/etools/docs/library/238411/ppa.pdf, diakses tanggal 20 Agustus 2009).
- Ranggoaini Jahja, Haryana, Dina Mariana, Maldi Rendra, Sistem Informasi Desa Sistem Informasi dan Data untuk Pembaruan Desa, Combine Resource Institution, 2012.
- Wau, Wilhem, Sistem Informasi Desa : Mengelola Sumber Daya Lokal untuk Kemandirian Desa. CRI, 2012.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan

TENTANG PENULIS

Rangoaini Jahja, biasa dipanggil Nieke, lahir di Jakarta 18 Juli 1974. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta tahun 1998 dan memperoleh gelar Master untuk Ilmu Antropologi dan Budaya tahun 2003 dari Fakultas Antropologi Universitas Gadjah Mada. Memulai aktivitas pemberdayaan masyarakat sejak tahun 1996 hingga 2004 pada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat di Jakarta yang memiliki perhatian terbesar pada permasalahan Anak dan Perempuan, akhirnya bergabung dengan *COMBINE Resource Institution*. Saat ini ia menjadi Direktur Pelaksana di Lembaga tersebut.

Bambang Hery Purwanto, Lahir di Jogja 14 Nopember 1972, alumni dari Universitas Janabadra Yogyakarta. Pengalaman sejak tahun 1999–2006 sebagai staf Pendamping Lapangan pada Koperasi Pedagang Kakilima di Yogyakarta, Field Consultant pada Program *Food For Work* (FFW), Peace Building Program Staff pada Lintas Interfaith. Dan sejak tahun 2006 sampai sekarang berproses dengan masyarakat di desa Semoyo Kecamatan Patuk Gunungkidul dalam mengembangkan organisasi komunitas Serikat Petani Pembaharu Gunungkidul dan menjadi Staff

Program di Perkumpulan IDEA Yogyakarta menjalankan fungsi *Community Organizer*, advokasi kelompok untuk pemenuhan hak-hak dasar warga negara melalui partisipasi perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Gunungkidul.

Muhammad Afandi, lahir di Deli Serdang, 25 Agustus 1982. Sejak tahun 2000 sudah aktif sebagai peneliti dan sekarang sebagai staff Litbang di *COMBINE Resource Institution*. Tahun 2010 menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Swadaya Medan. Dan tahun 2013 menamatkan pendidikan pasca sarjana di Jurusan Antropologi UGM.

PROFIL FPPD

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) merupakan arena untuk menyemai gagasan dan mendorong gerakan pembaharuan desa. FPPD sebagai forum terbuka, merupakan arena bagi proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, pengalaman multipihak, yang memungkinkan penyebaran gagasan pembaharuan desa, konsolidasi gerakan dan jaringan, serta kelahiran kebijakan yang responsif terhadap desa.

Visi

Menjadi arena belajar pengembangan pembaharuan desa yang terpercaya untuk mewujudkan masyarakat desa yang otonom dan demokratis

Misi

Meningkatkan keterpaduan gerak antar pihak untuk pembaharuan desa

Nilai-nilai Dasar

Menghormati keputusan bersama

Solidaritas

Tanggung-gugat

Menghargai perbedaan

Strategi

Konsolidasi gerakan pembaharuan desa

Sistem Informasi Desa (SID) atau Sistem Administrasi Informasi Desa (SAID) merupakan suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa. Salah satu media yang digunakan adalah media teknologi informasi berbasis digital dengan memanfaatkan sebuah aplikasi atau *software* untuk membantu menyimpan, memanggil, memilah dan menganalisa data. Pemanfaatan sistem ini telah membantu beberapa desa yang menerapkannya dalam proses pelayanan publik seperti untuk proses pembuatan surat menyurat bagi warga desa maupun pelayanan data bagi pemerintah supra desa. Pada bagian lain dari sistem ini juga dapat difungsikan sebagai alat untuk olah data potensi desa, pemetaan kemiskinan secara partisipatif, pengelolaan kebencanaan dan ke akan terus berkembang untuk fungsi-fungsi analisis lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Partisipasi warga dalam proses pembangunan sistem informasi ini merupakan kekuatan bagi keberhasilan desa untuk mengelola dan memanfaatkan data dan potensinya yang pada akhirnya akan menuju pada tercapainya kesejahteraan bagi warga desanya.

“Sebelum menggunakan SAID ini, kami juga telah konsen untuk membangun kemandirian desa. Salah satunya adalah dengan melakukan pendataan di desa-desa guna menunjang perbaikan pelayanan di pemerintahan desa. Nah, ketika ini di support oleh SAID, pendataan dirasakan menjadi lebih baik”. -Darwis-Mitra ACCESS di Kabupaten Bima, NTB-

“ ... Sistem Informasi Desa adalah program yang bisa membuat kita bisa layani masyarakat dengan tepat dan cepat ... Buku ini jika kita baca akan jadi bahan kita. Dengan gunakan SID desa kita akan semakin maju. -Lalu Ratmaji NTB

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

Jl. Karangnangka No. 175, Dusun Demangan
Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta,
Telp./Fax. 0274-4333665, mbl: 0811 250 3790,
website: //www.forumdesa.org
E-mail: fppd@indosat.net.id

Australian Community Development and Civil Society
Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II

Australian Aid managed by IDSS on behalf of the Australian Government

